



Adu Jitu Melawan Otokrat

Laporan Studi *Baseline* untuk *Connect, Defend, Act!*

disusun oleh
diah kusumaningrum
Daniel Petz
Fanya Tarissa Anindita
Dhania Salsha Handiani
Ni Kadek Dewi Puspitasari

Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
Glosarium.....	ii
Daftar Singkatan	iv
Ringkasan Eksekutif	1
Tidak Baik-Baik Saja: Penyusutan Lambat Ruang-Waktu Sipil.....	1
Rapatkan Barisan: Rekalibrasi Sekutu dan Strategi.....	1
Gas Pol: Intensifikasi dan Harga Mati	1
Adu Jitu Melawan Otokrat	3
Mengapa Melakukannya?	3
Bagaimana Melakukannya?.....	3
Bagaimana Alurnya?	4
Gambaran Besar	6
Indonesia dalam Tren Global: Gelombang Ketiga Otokratisasi.....	6
Konsepsi Lokal: Pluriversalitas Ruang-Waktu Sipil	8
Strategi dan Taktik Utama: Buku Pedoman Otoritarianisme	9
<i>Connect</i>.....	15
Keberagaman Ruang-Waktu Sipil.....	16
Semakin Banyak, Semakin Saling Jaga	17
Menguatkan Kohesi	19
Mengetengahkan Papua.....	20
<i>Defend</i>.....	21
Barisan Pertahanan yang Renggang	22
Pekerjaan Sampingan Penuh Waktu yang Melelahkan	22
Peningkatan Kapasitas	26
<i>Act</i>.....	28
Memadati Ruang-Waktu Sipil.....	28
Menekan di Titik-Titik Vital	29
Bermain Ofensif	30
Referensi.....	32
Lampiran.....	37

Glosarium

<i>Assertion</i> (Penyuara)	Bentuk aktivisme digital tingkat penonton di mana aktivis membuat dan menyebarkan sendiri konten di media sosial (lihat George & Leidner 2019).
<i>Boiling Frog Syndrome</i> (Sindrom Katak Direbus)	Fenomena yang mengacu pada ketidaksadaran terhadap situasi yang berubah secara bertahap—saat tersadar, situasinya sudah sangat parah dan terlambat.
<i>Bonding</i> (Mengikat)	Sebuah konsep dari studi konflik etnik yang mengacu pada jenis modal sosial yang "mengikat" anggota-anggota dari identitas kelompok ras, agama, etnis, profesi, dan pengelompokan sosial lain yang sama (lihat Putnam 2001 dan Varshney 2002).
<i>Botivism</i> (Penggeruduk)	Bentuk aktivisme digital tingkat peralihan di mana aktivis menggunakan <i>bot</i> dan teknik otomasi lainnya (lihat George & Leidner 2019).
<i>Bridging</i> (Menjembatani)	Sebuah konsep dari studi konflik etnik yang mengacu pada jenis modal sosial yang "menjembatani" anggota-anggota dari identitas kelompok ras, agama, etnis, profesi, dan pengelompokan sosial lainnya yang berbeda (lihat Putnam 2001 dan Varshney 2002).
<i>Clicktivism</i> (Pengetuk)	Bentuk aktivisme digital tingkat penonton di mana aktivis menyukai (<i>like</i>), memberikan suara (<i>upvote</i>), atau mengikuti (<i>follow</i>) unggahan media sosial atau blog seorang aktivis (lihat George & Leidner 2019).
<i>Data Activism</i> (Penyedia Data)	Bentuk aktivisme digital tingkat petarung di mana aktivis meningkatkan penguasaan individu terhadap data, baik yang tidak tersedia, maupun yang secara eksklusif dimiliki negara atau korporasi (lihat George & Leidner 2019).
<i>E-funding</i> (Penggalang Dana)	Bentuk aktivisme digital tingkat peralihan di mana aktivis menggunakan teknologi digital untuk mengumpulkan pendanaan (lihat George & Leidner 2019).
<i>E-Petition</i> (Petisi Digital)	Bentuk aktivisme digital tingkat peralihan di mana aktivis mengorganisasikan petisi daring yang membuka kesempatan pada warga untuk meminta pengkajian ulang terhadap tindakan atau kebijakan tertentu (lihat George & Leidner 2019).
<i>Eksplosure</i> (Pembongkar Informasi)	Bentuk aktivisme digital tingkat petarung di mana aktivis menyebarkan informasi yang sengaja disembunyikan pihak tertentu dari publik (lihat George & Leidner 2019).
<i>Hacktivism</i> (Peretas)	Bentuk aktivisme digital tingkat petarung di mana aktivis meretas situs atau akun tertentu demi tujuan sosial atau politik (lihat George & Leidner 2019).
Intervensi Nirkekerasan	Sebuah istilah dalam Studi Perlawanan Nirkekerasan yang dicetuskan oleh Gene Sharp (1973) yang merujuk pada metode-metode aksi nirkekerasan di mana para aktor tidak hanya menunjukkan perlawanan dan menarik partisipasi mereka, tetapi juga berupaya mendisrupsi praktik-praktik atau institusi-institusi yang sedang dilawan.

<i>Jiu-jitsu Moral</i>	Sebuah istilah dalam Studi Perlawanan Nirkekerasan yang mengacu pada lawan yang keseimbangannya "terganggu" secara moral sebagai efek dari taktik-taktik perlawanan nirkekerasan tertentu.
<i>Jiu-jitsu Politik</i>	Sebuah istilah dalam Studi Nirkekerasan yang mengacu pada lawan yang keseimbangannya "terganggu" secara politik sebagai efek dari taktik-taktik perlawanan nirkekerasan tertentu.
<i>Metavoicing (Penyuara)</i>	Bentuk aktivisme digital tingkat penonton di mana aktivis membagikan, <i>re-tweet</i> , melaporkan, atau mengomentari unggahan media sosial orang lain (lihat George & Leidner 2019).
Nonkooperasi	Sebuah istilah dalam Studi Perlawanan Nirkekerasan yang dicetuskan oleh Gene Sharp (1973) yang merujuk pada metode-metode aksi nirkekerasan di mana para aktor tidak hanya menunjukkan perlawanan, tetapi juga menarik diri dari praktik-praktik atau institusi-institusi yang sedang dilawan.
Perlawanan Nirkekerasan (<i>Nonviolent Resistance</i>)	Sebuah istilah payung untuk aneka metode berkonflik yang tidak menggunakan kekerasan, setidaknya terhadap pihak lain (lihat Weber dan Burrowes 1991).
Pilar Dukungan (<i>Pillars of Support</i>)	Sebuah kerangka konseptual dalam Studi Nirkekerasan untuk memetakan basis dukungan lawan (lihat Popovic 2007).
<i>Political Consumerism</i> (Pemboikot)	Bentuk aktivisme digital tingkat peralihan di mana aktivis menyelaraskan kegiatan belanja digitalnya dengan pandangan politik dan posisionalitas produsen (lihat George & Leidner 2019).
Proteksionisme Filantropis	Sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Transnational Institute (2017) untuk merujuk pada serangkaian kendala yang diberlakukan oleh pemerintah untuk menghalangi kemampuan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam negeri untuk mendapatkan pendanaan internasional.
Protes dan Persuasi	Sebuah istilah dalam Studi Nirkekerasan yang dicetuskan oleh Gene Sharp (1973) yang merujuk pada metode-metode aksi nirkekerasan di mana para aktor "hanya" menunjukkan posisi mereka yang menentang atau mendukung suatu hal.
Ruang-waktu Sipil (<i>Civic Spacetime</i>)	Rekonseptualisasi kami tentang "ruang sipil" yang menekankan bahwa masalahnya tidak hanya soal penyusutan ruang sipil, tetapi juga berkurangnya waktu untuk merawat ruang-ruang tersebut.
Spektrum Sekutu (<i>Spectrum of Allies</i>)	Sebuah kerangka konseptual dalam Studi Nirkekerasan yang memetakan para aktor ke dalam sekutu aktif, sekutu pasif, netral, oponen pasif, dan lawan aktif (lihat Boyd 2012).
<i>The Authoritarian Playbook</i> (Buku Pedoman Otoritarianisme)	Sebuah kerangka konseptual yang diperkenalkan oleh Protect Democracy (2022) yang memetakan tujuh strategi otokrat dalam menggerus demokrasi.
Titik Intervensi (<i>Points of Intervention</i>)	Sebuah kerangka konseptual dari Studi Nirkekerasan yang memetakan titik-titik dalam sistem yang perlu disasar guna melumpuhkan lawan, yaitu titik produksi, titik destruksi, titik konsumsi, titik keputusan, titik asumsi, dan titik peluang (lihat Reinsborough & Canning 2017).

Daftar Singkatan

AJI	Aliansi Jurnalis Independen
AMS	Aktor Masyarakat Sipil
DCTD	Dana Cepat Tanggap Darurat
DPD	Damai Pangkal Damai
EIU	Economist Intelligence Unit
FH	Freedom House
GEDI	Gender, Disabilitas, dan Inklusi
HAM	Hak Asasi Manusia
ICSF	Indonesia Civil Society Forum
Japelidi	Jaringan Pegiat Literasi Digital
KBB	Koalisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
KKJ	Komisi Keselamatan Jurnalis
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas Perempuan	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
KPA	Konsorsium Pembaruan Agraria
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KUPI	Kongres Ulama Perempuan Indonesia
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MAFINDO	Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia
MBKM	Merdeka Belajar Kampus Merdeka
PAM Swakarsa	Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PSHK	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
PSN	Proyek Strategis Nasional
SISTER-DIKTI	Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi Pendidikan Tinggi
SOGIESC	<i>Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression, and Sex Characteristics</i>

SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
UCP	<i>Unarmed Civilian Protection</i>
UU ITE	Undang-undang Teknologi Informasi Elektronik
UU Ormas	Undang-undang Organisasi Masyarakat
V-Dem	Varieties of Democracy
YLBHI	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Ringkasan Eksekutif

Studi *baseline* ini dirancang sebagai pijakan bagi Connect, Defend, Act! (CDA), proyek bersama Hivos dan Humanis yang didukung oleh Norwegian Agency for Development and Cooperation (NORAD). Befokus pada Indonesia, kami mengkaji ancaman-ancaman yang dihadapi oleh para aktor masyarakat sipil (AMS), memetakan ekosistem dan kapasitas mereka, serta menyusun strategi untuk mendukung mereka.

Mengandalkan studi pustaka dan wawancara dengan informan-informan kunci, studi yang berlangsung selama 15 hari ini berpegang teguh pada metodologi feminis, yaitu pluriversalitas, intersubjektivitas, interseksionalitas, dan posisionalitas. Kami tidak datang memaksakan definisi kaku mengenai "ruang sipil." Justru, kami menggali bagaimana hal tersebut dipahami dan dialami oleh para subyek. Dalam memilih referensi dan responden, kami menyetengahkan (*centering*) perempuan, orang muda, ragam SOGIESC, serta kelompok-kelompok minoritas dan terpinggirkan lainnya. Berdasarkan pandangan mereka, kami merekonseptualisasi "ruang sipil" (*civic space*) menjadi "ruang-waktu sipil" (*civic spacetime*) dan memperlakukan CDA bukan sebagai rangkaian yang linear. Berikut tiga temuan utama kami.

Tidak Baik-Baik Saja: Penyusutan Lambat Ruang-Waktu Sipil

Di tengah gelombang ketiga otokratisasi, AMS di berbagai penjuru dunia berhadapan dengan lawan yang tidak serta-merta menghancurkan demokrasi, tetapi justru memanfaatkannya guna memperoleh dan mengonsolidasikan kekuasaan. Ini dilakukan secara subtil, bertahap, dan perlahan, sehingga tidak mengherankan jika penyusutan ruang sipil selama dua dekade terakhir tidak segera disambut protes besar. Selain itu, banyaknya (mantan) pekerja lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi di jajaran pemerintahan memberikan kesan, atau ilusi, bahwa demokrasi Indonesia "*baik-baik saja*." Upaya perlawanan perlu secara serius memperhatikan tidak hanya penyusutan ruang gerak, ruang hidup, ruang digital, ruang kontestasi, dan ruang privat, melainkan juga berkurangnya waktu untuk merawat ruang-ruang tersebut.

Rapatkan Barisan: Rekalibrasi Sekutu dan Strategi

Meski setia melawan balik penyusutan ruang-waktu sipil, AMS Indonesia kewalahan melakukannya. Perlu lebih banyak pihak yang diajak masuk dan merapatkan barisan. Yang perlu diprioritaskan dalam barisan justru mereka yang paling rentan dan terpinggirkan, serta yang selama ini tidak dibayangkan ikut serta. Juga, AMS perlu mengintervensi titik-titik produksi dan konsumsi, mengingat yang dilakukan saat ini cenderung berfokus pada titik-titik keputusan dan destruksi. Guna mendukungnya, keterampilan yang mendesak untuk dikembangkan adalah solidaritas interseksional dan lintas sektoral, *brokering* serta *unarmed civilian protection*.

Gas Pol: Intensifikasi dan Harga Mati

Perlawanan nirkekerasan dan aktivisme digital di Indonesia cukup banyak, tetapi cenderung hanya mengandalkan metode yang repertoarnya terbatas dan intensitasnya rendah, sehingga mudah diantisipasi dan dipatahkan lawan. Guna mendisrupsi agenda para otokrat, AMS perlu menimpakan *dilemma action* yang pas kepada lawan, melalui metode-metode baru yang berintensitas tinggi. Selain itu, AMS perlu menentukan beberapa harga "harga mati," yang jika dilanggar oleh lawan, maka akan mengundang perlawanan masif dari kalangan AMS.

Rekomendasi

Untuk Aktor Masyarakat Sipil:

- 1. Menjalin Solidaritas Interseksional**
 - o Petakan dan perbarui terus Spektrum Sekutu untuk semua wilayah, sektor, dan jaringan. Tarik aktor netral dan sekutu pasif ke sisi spektrum kita, supaya mereka tidak ditarik mendekat sisi spektrum lawan. Rekrut sejak dini, jangan pasang standar tinggi, jangkau secara sistematis di sekolah dan klub.
 - o Pinjamkan *privilege* kepada individu dan kelompok yang irisan identitasnya (gender, ragam SOGIESC, etnisitas, usia, kelas, dis/abilitas, dll) menjadikannya lebih rentan dan terpinggirkan.
- 2. Antisipasi Berbagai Skenario dan Tetapkan Harga Mati**
 - o Antisipasi langkah lawan menggunakan Buku Pedoman Otoritarianisme. Kembangkan dan simulasikan berbagai strategi mencegah dan menangkalnya.
 - o Tetapkan harga mati yang jelas, misalnya keberlangsungan pemilihan umum langsung untuk jabatan presiden dan kepala daerah. Komunikasikan harga mati tersebut kepada publik dan lawan. Siapkan dan latihkan tanggapan kolektif, misalnya perlawanan nirkekerasan masif, sekiranya lawan melanggar harga mati tersebut.
- 3. Perkuat Taktik Perlawanan**
 - o Sempurnakan *standard operating procedures* (SOP) melalui simulasi dan *stress-testing*.
 - o Perluas dan intensifkan taktik perlawanan nirkekerasan, terutama soal menimpakan *dilemma actions* di Titik Intervensi beragam.
 - o Tuntut pencopotan berbagai aturan yang membatasi hak-hak sipil (UU ITE, Ormas, Cipta Kerja, dll). Dokumentasikan dampak negatifnya dan laporkan pada forum internasional. Manfaatkan mekanisme yudisial, baik untuk pendekatan remedial maupun lainnya.
- 4. Pertajam Daya Kritis Warga**
 - o Sebarkan informasi tentang kemunduran demokrasi di luar kalangan aktivis.
 - o Tunjukkan keteladanan berpikir kritis, bekerja untuk demokrasi, dan berpihak kepada yang lemah.
 - o Kembangkan dan sebarkan narasi tandingan, misalnya bingkai bahwa perjuangan keadilan sosial adalah tugas kewargaan dan tanda cinta seorang warga negara.

Untuk Lembaga Donor:

- 1. Perluas Dukungan Teknis dan Finansial**
 - o Sediakan dana darurat yang dapat diakses secara cepat dan fleksibel. Dorong dan biayai kegiatan pengembangan kapasitas termasuk pelatihan dan pelatihan untuk pelatih, dengan mengutamakan pelatih dan fasilitator lokal. Dorong dan biayai *stress-testing* dan simulasi skenario lawan. Pastikan sistem pelaporan tidak bertele-tele dan tidak birokratis, meski tetap menjamin akuntabilitas.
 - o Sediakan sumber daya yang cukup untuk pemantauan ruang sipil di berbagai wilayah dan berbagai isu.
 - o Sediakan sumber daya yang cukup untuk memasukkan daya pikir kritis dan hak asasi manusia (HAM) ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan.
- 2. Tingkatkan Advokasi Internasional**
 - o Dorong AMS untuk melaporkan ke forum internasional dampak negatif dari aturan yang ada. Dorong aktor dan forum internasional menuntut komitmen HAM Indonesia.

Untuk Pemerintah Indonesia:

- 1. Lindungi Ruang-Waktu Sipil dan Supremasi Hukum**
 - o Cabut atau revisi aneka aturan dari rezim sebelumnya yang berkontribusi dalam penyusutan ruang-waktu sipil, termasuk UU ITE, Ormas, Cipta Kerja, KPK, dll.
- 2. Lindungi Aktivis dan Adili Pelaku Serangan terhadap Mereka**
 - o Jamin keselamatan dan kesejahteraan para aktivis dan jurnalis. Usut dan tuntaskan secara adil serangan terhadap mereka.
- 3. Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan**
 - o Ubah kurikulum sekolah dan universitas supaya menghasilkan warga yang dapat berpikir kritis. Pastikan bahwa HAM dan keadilan sosial menjadi inti dari kurikulum.

Adu Jitu Melawan Otokrat

Laporan Studi *Baseline* untuk *Connect, Defend, Act!*

"Aduh, laporan lagi, laporan lagi." Jangan khawatir, kami sadar bahwa sudah ada banyak organisasi yang menerbitkan laporan seputar penyusutan ruang sipil di Indonesia. Guna menghargai kerja keras mereka, kami berusaha untuk tidak sekadar menulis (ulang) soal ini, tetapi memberi beberapa tawaran spesifik yang memungkinkan aktor masyarakat sipil (AMS) pecinta demokrasi melawan penyusutan ruang sipil secara efektif.

Mengapa Melakukannya?

Judul laporan kami, "Adu Jitu Melawan Otokrat," menggarisbawahi fakta bahwa aktor-aktor otokratik di seluruh dunia sangat mahir dalam memanfaatkan prosedur demokrasi untuk naik kekuasaan dan kemudian menggerogoti demokrasi dari dalam. Tahu betul bahwa AMS di Indonesia melawan balik—dengan sebaik-baiknya, se hormat-hormatnya—kami menempatkan studi *baseline* ini sebagai ikhtiar meningkatkan peluang keberhasilan mereka.

Secara khusus, studi *baseline* ini dirancang sebagai pijakan bagi *Connect, Defend, Act!* (CDA), sebuah proyek milik Hivos dan Humanis, yang didukung Norwegian Agency for Development and Cooperation (NORAD). Sebagai tanggapan terhadap penyusutan ruang sipil di Kolombia, Indonesia, Malawi, dan Palestina, semangat proyek ini adalah memperkuat aksi-aksi AMS di empat negara tersebut. Dalam upayanya memberi dukungan strategis kepada AMS yang relevan dan aktif berkontribusi terhadap ruang sipil, proyek ini mengedepankan perspektif berbagai sektor dan kepentingan, terutama yang selama ini terpinggirkan—misalnya perempuan, orang muda, ragam SOGIESC, dan masyarakat adat. Berkomitmen terhadap kepemilikan dan kepemimpinan lokal, Hivos dan Humanis mengambil peran sebagai fasilitator dan pendukung yang menekankan agensi dan pengetahuan AMS.

Bagaimana Melakukannya?

Mengacu pada kerangka yang ditetapkan Hivos dan Humanis (lihat Lampiran 1), studi *baseline* ini memetakan ancaman digital dan holistik yang dihadapi AMS, serta modalitas dan kapasitas mereka dalam menanggapi ancaman-ancaman tersebut—yang berujung pada strategi memastikan efektivitas AMS melawan balik penyusutan ruang sipil. Bagi kami, penting memastikan supaya studi ini memprioritaskan para pemegang hak (*rights-holder*) yang selama ini kurang terlayani (*underserved*), termasuk perempuan, orang muda, ragam SOGIESC (*sexual orientation, gender identity, gender expressions, and sex characteristics*) dan kelompok terpinggirkan lainnya. Kami juga melihat pentingnya menakar bagaimana tiga infrastruktur spesifik, yaitu aturan perundangan, pemilihan umum, dan koalisi atau jaringan di kalangan AMS, mempengaruhi kapasitas AMS merawat ruang sipil.

Kami berpegang pada metodologi feminis seputar pluriversalitas, intersubjektivitas, interseksionalitas, dan posisionalitas. Kami percaya bahwa penyusutan ruang sipil dialami secara berbeda oleh individu yang berbeda, tergantung dari irisan atau persimpangan identitas yang mereka miliki. Kami juga menyadari bahwa sebagai perempuan heteronormatif, kelas menengah,

Muslim, yang berasal dari Jawa—dengan pengecualian seorang anggota tim adalah perempuan Hindu dari Bali dan seorang anggota tim adalah laki-laki kulit putih—kami memiliki beberapa bias dan titik buta tertentu. Dengan hati-hati, kami mengelola bias dan titik buta tersebut, di mana kami memilih narasumber dengan menyetengahkan (*centering*) pengalaman hidup kelompok-kelompok yang terpinggirkan, serta menjalankan kewajiban saling jaga (*duty of care*) terhadap semua pihak yang terlibat.

Studi 15 hari ini menggunakan dua strategi utama pengumpulan data. Yang pertama adalah studi pustaka (*desk research*) terhadap lebih dari 60 laporan dan publikasi akademik, serta terhadap 6 pangkalan data. Di sini, kami mementingkan tulisan yang dirilis organisasi dan individu lokal, lalu mendudukkannya dalam konteks global. Yang kedua adalah wawancara dengan informan kunci (*key informant interview*), yang mencakup 20 narasumber. Data narasumber yang terdisagregasi tersedia pada Lampiran 2.

Dalam menganalisis data, kami memanfaatkan [Buku Pedoman Otoritarianisme](#) dan beberapa kerangka dari Studi Perlawanan Nirkekerasan (*Nonviolent Resistance Studies*), yaitu [Spektrum Sekutu](#), [Titik Intervensi](#), dan [Pilar Dukungan](#). Kami percaya bahwa kerangka-kerangka tersebut memudahkan AMS, terutama yang melakukan pengorganisasian masyarakat dan menjadi pembela hak asasi manusia (HAM), menindaklanjuti temuan studi ini. Guna memastikan akurasi dan kualitas laporan ini, versi awal laporan ini dikirimkan kepada semua narasumber dan dua pengulas eksternal, untuk kemudian direvisi sesuai masukan mereka.

Seperti halnya semua penelitian, studi ini memiliki sejumlah keterbatasan. Mengingat bahwa keseluruhan proses merancang studi, mengumpulkan data, menginterpretasi data, dan menulis laporan harus selesai dalam 15 hari, kami lebih banyak mengandalkan studi pustaka alih-alih wawancara narasumber. Karena hanya dapat berproses dengan sejumlah kecil narasumber, kami memprioritaskan mereka yang suaranya belum atau kurang terwakili dalam laporan lembaga dan liputan media, mereka yang tinggal dan bekerja di luar Jawa, perempuan, kaum muda, dan minoritas SOGIESC, serta mereka yang bekerja di lembaga swadaya masyarakat (LSM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), media, dan kampus. Mengingat sempitnya waktu studi, kami hanya berinteraksi secara terbatas dengan AMS dari dunia seni dan belum sempat berbicara langsung dengan AMS dari partai politik maupun lembaga donor. Meskipun partai politik dan lembaga donor merupakan bagian penting ekosistem AMS, kami mengutamakan berproses dengan pihak-pihak yang berada di garis depan melawan otokratisasi ataupun mereka yang menjadi target represi negara: pekerja LSM, LBH, media, kampus, dan seni.

Sebagai *disclaimer*, fokus studi kami adalah formulasi strategi bagi AMS, bukan analisis mendalam mengenai penyebab, bentuk, dan intensitas penyusutan ruang sipil di Indonesia. Untuk yang terakhir ini, kami meminjam analisis dari banyak laporan yang dipublikasikan oleh LSM lokal dan internasional.

Bagaimana Alurnya?

Pembabakan laporan ini mengikuti urutan *connect-defend-act* dari proyek CDA, dengan sebelumnya menawarkan gambaran besar mengenai penyusutan ruang sipil di Indonesia. Penting dicatat bahwa kami tidak mengonseptualisasikan *connect*, *defend*, dan *act* sebagai secara linear. Seperti diuraikan di akhir bab berikutnya, kami memahami bahwa "*act*" atau "*defend*" mungkin saja dilakukan sebelum "*connect*."

Gambaran Besar. Bab ini memberikan gambaran umum tentang apa yang telah dikatakan dan ditulis tentang penyusutan ruang sipil di Indonesia. Ada tiga hal yang kami garisbawahi. Yang pertama adalah analisis yang mendudukan Indonesia dalam tren global otokratisasi gelombang ketiga. Yang kedua adalah analisis seputar keragaman pandangan AMS mengenai apa itu ruang sipil (*civic space*), yang selanjutnya mendorong kami merekonseptualisasinya menjadi "ruang-waktu sipil" (*civic spacetime*). Yang ketiga adalah analisis singkat terhadap proses penyusutan ruang-waktu sipil di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir, dengan mengkategorisasinya ke dalam tujuh strategi Buku Pedoman Otoritarianisme.

Connect. Menggunakan kerangka Spektrum Sekutu, bab ini membahas ekosistem AMS—siapa saja aktor yang ada, bagaimana posisi mereka satu sama lain, serta apa yang memungkinkan ataupun menghalangi mereka terhubung satu sama lain. Ada empat hal yang kami sorot. Yang pertama adalah pluriversalitas ruang-waktu sipil di Indonesia. Yang kedua adalah seruan merangkul lebih banyak aktor ke dalam barisan. Yang ketiga adalah kebutuhan membangun kohesi lebih kuat antar AMS. Yang terakhir adalah urgensi mengetengahkan Papua.

Defend. Menggunakan kerangka Titik Intervensi, bab ini membahas rekam jejak AMS mempertahankan dan melawan penyusutan ruang-waktu sipil. Ada empat hal yang kami tekankan. Yang pertama adalah barisan pertahanan yang renggang. Yang kedua adalah kewalahan di kalangan AMS. Yang ketiga adalah kebutuhan mengintensifkan perlawanan. Yang keempat adalah usulan seputar kapasitas yang perlu dikembangkan di kalangan AMS.

Act. Berefleksi dari bab-bab sebelumnya, bab ini mengutarakan tiga strategi. Yang pertama adalah seruan meramaikan ruang-waktu sipil. Yang kedua adalah seruan menekan di titik-titik yang vital. Yang ketiga adalah seruan bermain ofensif, bukan sekadar defensif.

Gambaran Besar

Ada banyak pandangan soal menyusutnya ruang sipil di Indonesia dan bagaimana hal tersebut berdampak pada AMS. Pada bab ini, kami mencoba merangkumnya sembari mengedepankan tiga hal. Pertama, kami mendudukan penyusutan ruang sipil di Indonesia dalam konteks global gelombang ketiga otokratisasi. Kedua, kami mengetengahkan berbagai konsepsi lokal tentang "ruang sipil" (*civic space*) dan melakukan rekonseptualisasi menjadi "ruang-waktu sipil" (*civic spacetime*). Ketiga, kami menggunakan kategorisasi dalam Buku Pedoman Otoritarianisme guna menggambarkan bagaimana penyusutan ruang-waktu sipil terjadi di Indonesia selama satu dekade terakhir.

Di bab ini, kami menggarisbawahi betapa lihai para otokrat, tidak hanya dalam dimensi "ruang," tetapi juga dimensi "waktu." Secara strategis, mereka memilih menggerogoti demokrasi secara pelan-pelan. Sebagaimana katak yang direbus (*boiling frog syndrome*), masyarakat Indonesia tidak merasakan proses kenaikan bertahap "suhu" otokratisasi, hingga tahu-tahu "mendidih." Karena banyak yang terlena dan tidak sadar bahwa demokrasi sedang digerogeti, protes besar baru muncul beberapa tahun belakangan, meski sebenarnya indeks global sudah menunjukkan adanya penurunan terus-menerus kualitas kebebasan sipil di Indonesia selama lebih dari satu dekade.

Indonesia dalam Tren Global: Gelombang Ketiga Otokratisasi

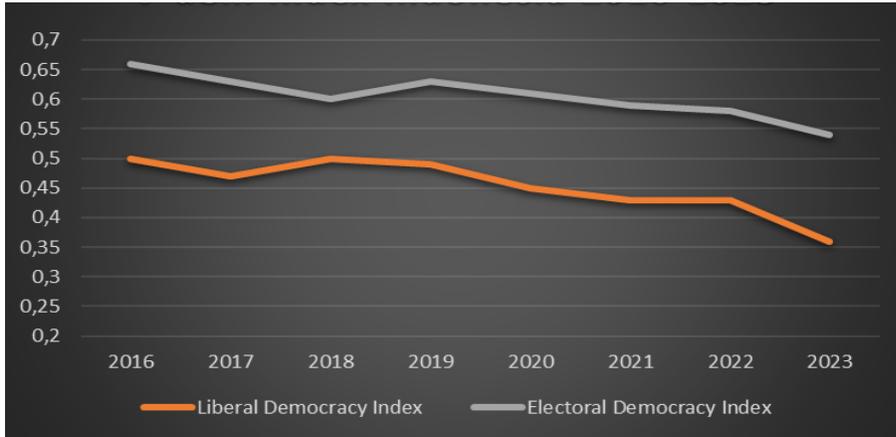
Menurut kami, penting menempatkan penyusutan ruang sipil di Indonesia dalam konteks global, yaitu gelombang ketiga otokratisasi. Seperti ditunjukkan Barbara Geddes (segera terbit) dan Lührman & Lindberg (2019), yang saat ini berusaha melumpuhkan demokrasi bukanlah para aktor yang sepenuhnya anti-demokrasi, tetapi justru mereka yang lihai memanfaatkan prosedur-prosedur demokrasi untuk masuk dalam lingkaran kekuasaan. Ini berbeda dengan dua gelombang sebelumnya, di mana otokratisasi diinisiasi oleh kudeta militer di negara-negara Selatan yang baru merdeka (1960-1970-an) atau oleh para pemimpin personalistik di negara-negara pasca-Soviet yang baru merdeka (1990-an). Dengan kata lain, saat ini AMS tidak sedang berhadapan dengan aktor-aktor yang serta merta meminggirkan demokrasi, tetapi justru aktor-aktor yang mengungguli kemampuan AMS dalam memanfaatkan demokrasi untuk mengonsolidasikan kekuasaan mereka.

Tren ini terlihat jelas dalam beberapa indeks demokrasi global, termasuk Varieties of Democracy (V-Dem), Freedom House (FH), Economist Intelligence Unit (EIU), dan Polity IV. [V-Dem](#) menunjukkan bahwa tingkat demokrasi yang dirasakan oleh kebanyakan orang pada tahun 2023 turun sedemikian rupa hingga setara dengan tahun 1985. [FH](#) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, 52 negara mengalami penurunan skor demokrasi, sementara hanya 21 negara yang skornya meningkat. [EIU](#) bahkan menyebutkan bahwa pada tahun yang sama, 68 negara mengalami penurunan skor demokrasi, sementara 32 negara mengalami peningkatan. Indeks-indeks tersebut tidak hanya menunjukkan penurunan kualitas demokrasi secara umum, tetapi juga melaporkan penurunan yang lebih substansial pada skor demokrasi liberal (V-Dem), skor kebebasan sipil (FH), atau skor kebebasan berserikat (EIU), dibandingkan dengan skor-skor lain terkait dengan pemilihan umum dan lembaga-lembaga politik.

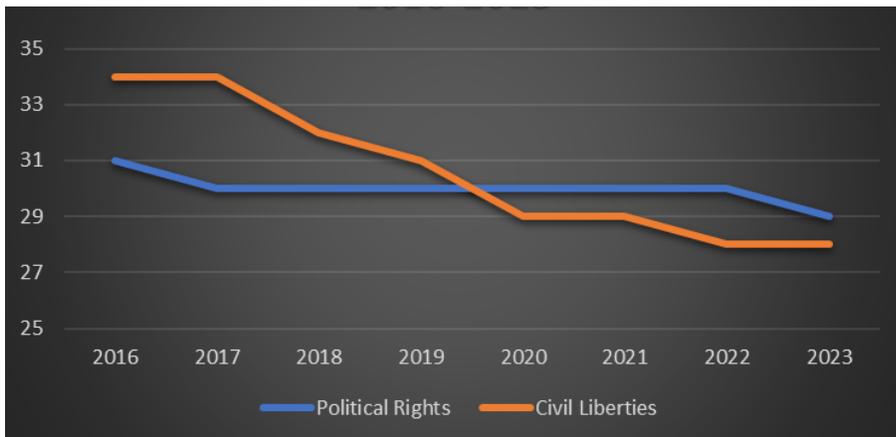
Indonesia menunjukkan tren serupa. V-Dem menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar yang mengalami otokratisasi (2023), hampir jatuh dari kategori *electoral democracy* ke *electoral autocracy* (2024). FH menurunkan peringkat Indonesia dari *free* menjadi *partly free* (2014-2024). Sementara itu, EIU mengklasifikasikan Indonesia sebagai *flawed democracy*

(2024). Seperti terlihat pada Gambar 1-3, skor kebebasan sipil Indonesia anjlok lebih signifikan dibandingkan dengan skor lainnya atau skor keseluruhan. Berfokus pada Gambar 3, kita dapat melihat bahwa meskipun terjadi penurunan tajam, skor Indonesia masih berada di atas rata-rata global. Ini membantu menjelaskan mengapa banyak yang gagal paham bahwa otokratisasi di Indonesia telah berlangsung setidaknya selama satu dekade—dan karenanya tidak menggunakan pemilihan umum 2024 untuk *vote out* (menghukum dengan tidak memilih) kubu yang bertanggung jawab mengikis kebebasan sipil dan demokrasi Indonesia sepanjang 2014 hingga 2024.

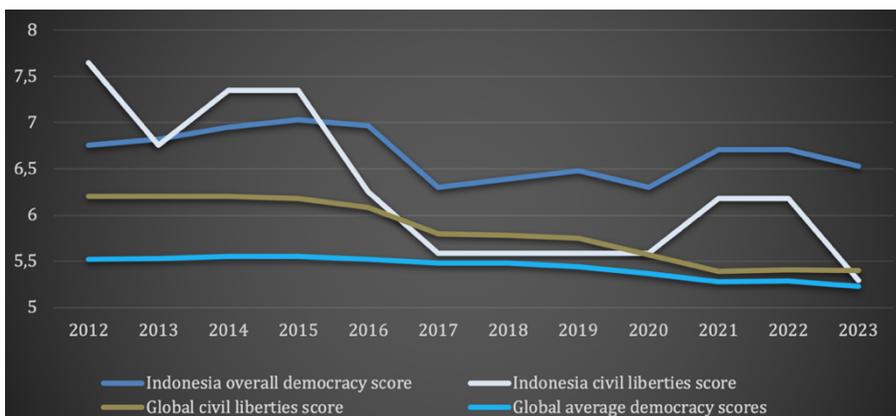
Gambar 1. Skor Demokrasi Indonesia tahun 2016-2023 Menurut *Varieties of Democracy* (V-Dem)



Gambar 2. Skor Demokrasi Indonesia Tahun 2016-2023 Menurut Freedom House (FH)

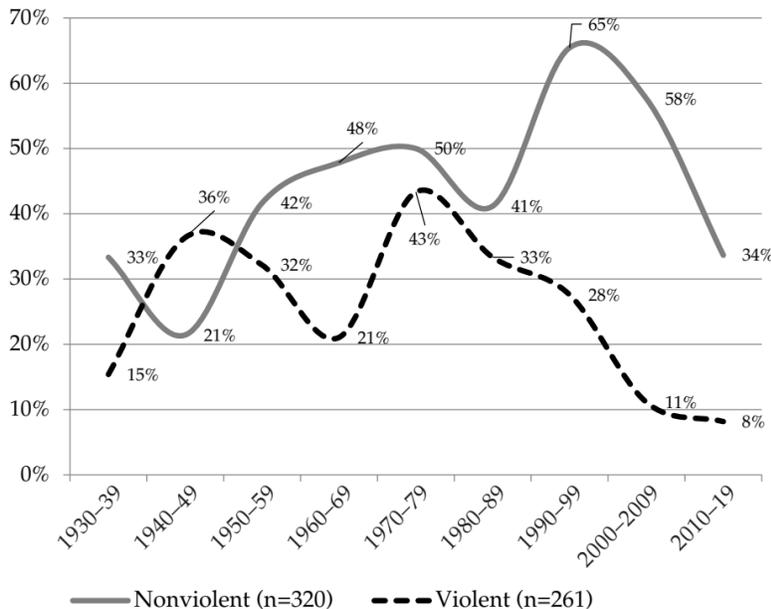


Gambar 3. Skor Demokrasi Indonesia Tahun 2016-2023 Menurut Economist Intelligence Unit (EIU)



Meskipun warga terus turun ke jalan dan ke gawai mereka untuk menyelamatkan demokrasi, ruang sipil di Indonesia masih terus menyusut dan masih menduduki status *obstructed* (terhalangi) sebagaimana penilaian [CIVICUS](#). Lagi-lagi, Indonesia tidak sendiri—di seantero dunia, terjadi penurunan efektivitas perlawanan sipil terhadap otokratisasi. Sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 4, tingkat keberhasilan kampanye nirkekerasan anti-rezim (*maximalist campaigns*) di seluruh dunia menurun, meskipun efektivitasnya masih jauh lebih tinggi dibanding yang menggunakan kekerasan. Nampaknya, banyak rezim menjadi semakin terampil mengantisipasi dan menangkal gerakan perlawanan sipil. Bahkan, mereka “cerdik” memanfaatkan pandemi COVID-19—mulai dari mencegah kerumunan massa turun ke jalan, hingga yang ekstrem di Brasil di mana pemerintah memanfaatkan mekanisme *lockdown* guna melacak lokasi para aktivis dan menangkap mereka. Di Indonesia, COVID-19 memberikan kesempatan bagi parlemen dan pemerintah mengesahkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada tahun 2020, yang saat dikenalkan pertama kali pada tahun 2019 langsung disambut demonstrasi besar-besaran di berbagai kota. Meskipun sebagian besar gerakan di Indonesia dan di seluruh dunia tampaknya masih sangat bergantung pada demonstrasi massa, semakin sedikit yang mampu melibatkan setidaknya 3,5% populasi, yang merupakan ambang batas kritis menciptakan kampanye yang efektif (Chenoweth [2020](#)).

Gambar 4. Tingkat Keberhasilan Perlawanan Dengan Kekerasan dan Nirkekerasan (1930-2019)



Sumber: Chenoweth 2020, hlm. 75

Konsep Lokal: Pluriversalitas Ruang-Waktu Sipil

Istilah “ruang sipil” telah sangat sering digunakan sehingga ada asumsi bahwa semua orang tahu dan setuju apa maknanya. Kami dengan sengaja menghindari asumsi ini dan menggali pemahaman yang lebih kontekstual di kalangan AMS mengenai konsep tersebut.

Memang, banyak AMS di Indonesia mendefinisikan ruang sipil sebagaimana [Perserikatan Bangsa-Bangsa](#) (PBB), yaitu “ruang yang memungkinkan masyarakat sipil berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat” dan [CIVICUS](#), yakni “penghormatan terhadap hukum, kebijakan, dan praktik kebebasan berserikat, berkumpul secara damai, dan menyampaikan pendapat, serta sejauh mana negara melindungi hak-hak dasar tersebut.”

[Lokataru](#) menggunakan definisi CIVICUS sebagai dasar memetakan tiga dimensi di mana ruang sipil mengalami penyusutan: (a) hak berserikat, (b) hak berkumpul secara damai, dan (c) hak berekspresi. [Pusat Studi Hukum dan Kebijakan](#) (PSHK) menggabungkan ketiganya dan menambahkan dua dimensi lagi, menjadi: (a) kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul, (b) hak berpartisipasi, dan (c) keamanan individu yang berbicara atas nama kepentingan publik.

Jika Lokataru dan PSHK melihat ruang sipil sebagai “ruang gerak” masyarakat sipil, Safenet secara khusus mendalami “ruang digital,” sementara [Lembaga Bantuan Hukum Jakarta](#) (LBH Jakarta) dan [Konsorsium Pembaruan Agraria](#) (KPA) memperluas konsep tersebut dengan memasukkan “ruang hidup.” [Damai Pangkal Damai](#) (DPD) menggarisbawahi perlunya melihat ruang sipil sebagai “ruang kontestasi.” [PurpleCode Collective](#) menunjukkan bagaimana ruang-ruang tersebut tumpang tindih dengan “ruang privat” yang perlu depatriarkalisasi, sementara [Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama](#) mengingatkan bagaimana keberagaman biasanya dikelola melalui logika kerukunan yang pada praktiknya menjadi “perukunan,” di mana kedua lembaga menggarisbawahi betapa penindasan terjadi juga di ruang-ruang yang lebih tersembunyi dan diskursif.

Selaras dengan pandangan di atas, sejumlah narasumber mengajukan beberapa indikator ruang sipil yang sehat: sikap anti-militer/militerisasi, kemampuan berpendapat tanpa rasa takut, kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang utuh (*informed decision*), komitmen pasang badan untuk kelompok lain yang lebih lemah, serta keterkaitan antara dunia digital dan aktual, di mana perlawanan di satu ranah diterjemahkan dengan baik di ranah lainnya.

Semua narasumber mengonfirmasi pengamatan kami sebelumnya bahwa AMS semakin kewalahan dengan “kegiatan normal sehari-hari.” Termasuk di dalamnya adalah mahasiswa yang sibuk bersaing satu sama lain dalam mendaftar magang dan/atau beasiswa belajar ke luar negeri (misalnya, melalui skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka/MBKM dari pemerintah), dosen yang tenggelam mengerjakan publikasi, konsultasi, dan tugas-tugas administratif (antara lain dengan memenuhi berbagai persyaratan SISTER-DIKTI yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan), LSM yang berjibaku dengan prosedur pendaftaran perkumpulan/yayasan di tengah lanskap pendanaan yang semakin kering (antara lain, guna memenuhi ketentuan UU Ormas), serta jurnalis yang bersusah payah menavigasi pergeseran dari media cetak ke media digital (antara lain, guna melindungi diri dari serangan digital).

Pada titik ini, kami merasa perlu meminjam gagasan Albert Einstein mengenai *spacetime* dan mengusulkan konsep “ruang-waktu sipil.” Dengan demikian, perhatian kita tidak hanya tertuju pada penyusutan ruang gerak, ruang digital, ruang hidup, ruang kontestasi, dan ruang privat, tetapi juga pada menyusutnya waktu yang dapat diinvestasikan guna merawat ruang-ruang tersebut. Masalahnya tidak sesederhana AMS kehilangan ruang untuk melawan balik otokratisasi, tetapi juga kehilangan waktu (dan energi) yang cukup besar untuk melakukannya. Ibaratnya, tanpa perlu melarang mahasiswa berdemonstrasi, mahasiswa sudah tidak punya waktu merancang dan melakukan demonstrasi. Bisa jadi, kurangnya perhatian kita akan dimensi waktu inilah yang memungkinkan para otokrat perlahan-lahan merayap masuk dan menggerogoti ruang-ruang sipil.

Strategi dan Taktik Utama: Buku Pedoman Otoritarianisme

Merosotnya demokrasi Indonesia, seperti dijelaskan Mietzner (2024, hlm. 13), “dikendalikan oleh elite, dipertahankan oleh rezim, dan terus ditoleransi secara sosial.” Sehubungan dengan itu, kami pun memanfaatkan Buku Pedoman Otoritarianisme (*The Authoritarian Playbook*) terbitan [Protect Democracy](#) guna memetakan tujuh strategi elite dalam penyusutan ruang sipil di Indonesia. Kami menemukan bahwa ketujuh strategi tersebut digunakan di Indonesia, utamanya oleh rezim yang berkuasa sepanjang periode 2014-2024. Meski beberapa strategi terasa lebih dominan, kesemuanya

saling memperkuat satu sama lain. Mengingat keterbatasan cakupan laporan ini, kami hanya menyajikan gambaran sekilas terhadap hal-hal besar yang terjadi di tingkat nasional, tanpa mengangkat aneka dinamika lokal. Sebagaimana terlihat di bawah, berkat perlawanan gigih AMS, tidak semua strategi otokratisasi berhasil.

Politisasi Lembaga Independen (*Politicizing Independent Institutions*). Menyusutnya ruang sipil Indonesia diwarnai politisasi beberapa lembaga independen. Bisa dibayangkan, pukulan terbesar dilayangkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi UU KPK pada tahun 2019 memungkinkan pemecatan terhadap hampir 60 staf KPK yang paling berdedikasi, menyusul upaya bertahun-tahun melabeli KPK sebagai Taliban. Pemecatan ini menyebabkan anjloknya kepercayaan publik terhadap KPK, yang sedikit banyak mempengaruhi pula kepercayaan terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Ombudsman. Beberapa narasumber dari kalangan pembela HAM mengatakan bahwa kepercayaan terhadap Komnas HAM naik-turun, tergantung pada kasus dan komisioner yang bertugas. Beberapa yang lain menyayangkan bahwa Komnas HAM dan Ombudsman belum menjadi sekutu bagi minoritas SOGIESC. Terkait Komnas Perempuan, yang menjadi kekhawatiran para aktivis bukanlah soal integritas lembaga tersebut, tetapi pada keterbatasan mandat dan kekuasaannya.

Salah satu taktik yang secara langsung berdampak pada LSM adalah Peraturan Pemerintah tahun 2017 yang mengamandemen UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dengan dalih melindungi masyarakat dari gerakan Islamis. Mengingat peraturan ini menjadi dasar hukum beroperasi di Indonesia, banyak LSM jadi tersibukkan oleh keharusan melengkapi lautan dokumen dan menjalankan prosedur berkepanjangan guna memenuhi persyaratan perencanaan, pendanaan, dan pelaporan yang baru. Selain itu, beberapa LSM internasional harus "mengakhiri" operasinya di Indonesia, hanya untuk "lahir kembali" sebagai LSM lokal. [Transnational Institute](#) menyebut taktik ini sebagai proteksionisme filantropis (*philanthropic protectionism*), yang membebani dan membatasi LSM dalam banyak hal, termasuk dalam menerima pendanaan internasional.

Pada tahun yang sama, pemerintah mengkonsolidasikan dukungan dari sebagian besar perusahaan media. Tiga oligarki media mendapatkan posisi penting di sejumlah kementerian, yang berujung pada liputan-liputan "bersahabat" terhadap presiden, dengan *approval rate* yang sebagian besar berada di angka 70-an dan 60-an (Mietzner [2024](#), Muhtadi & Muslim [2024](#)).

Pemerintah juga gencar menarik organisasi-organisasi Islam ke dalam orbitnya. Salah satu taktik terbaru pada tahun 2024 adalah dikeluarkannya aturan yang mengizinkan organisasi keagamaan untuk mendapatkan konsesi tambang. Meski sempat tampak ragu, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, mendaftar konsesi tersebut. Para aktivis lingkungan dan iklim pun dipaksa mempertimbangkan kembali apakah kedua organisasi tersebut berpotensi dijadikan sekutu.

Penyebaran Disinformasi (*Spreading Disinformation*). Di satu sisi, pemerintah Indonesia tidak terlibat dalam disinformasi skala besar dan sistematis sebagaimana Amerika Serikat pada tahun 2020 mengenai siapa sesungguhnya yang memenangkan pemilihan umum. Sangat bisa jadi, ini karena gencarnya gerakan anti-hoax di kalangan AMS, seperti yang dipelopori oleh Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (MAFINDO) dan Jaringan Pegiat Literasi Digital (JapeliDi).

Di sisi lain, tetap ada disinformasi yang memprihatinkan, yaitu terkait pelabelan AMS sebagai Islamis (Taliban, kadal gurun, dll), sayap kiri (komunis, anarkis, dll), tidak patriotik (pro-Barat, anti-Indonesia, pengkhianat, dll), atau tidak bermoral (kafir, sesat, fasik, dll). Beberapa narasumber ingat bagaimana para pekerja LSM dicap sebagai pembela Taliban ketika mereka mencoba mempertahankan supremasi KPK dan dicap sebagai Islamis ketika menolak revisi UU Ormas. Enggan ditengarai dekat

dengan gerakan Islamis, AMS pun akhirnya tunduk pada UU Ormas yang sangat menyita waktu dan tenaga.

Sebagai label, "Islamis" biasanya ditujukan kepada oposisi politik, sedangkan "anarkis" ditujukan kepada kaum muda. Sementara itu, label "pro-Barat" dan "anti-Indonesia" banyak ditujukan kepada LSM dan komunitas yang menerima dana internasional, terkadang ditambah dengan narasi bahwa dana tersebut adalah alat intervensi asing. Label-label yang sarat muatan moral, yang biasanya ditujukan kepada kelompok minoritas agama dan SOGIESC, merupakan label yang paling sarat kebencian dan secara signifikan meningkatkan risiko keamanan fisik dan digital terhadap orang-orang dengan ragam SOGIESC. Ketika dilabel, individu dan organisasi terpaksa menghabiskan banyak waktu (dan energi) mengakses langkah-langkah pengamanan yang tersedia bagi mereka—mulai dari "tiarap" di tempat penampungan dan rumah aman hingga mengikuti proses peradilan. Apapun pilihan responsnya, ruang-waktu sipil mereka menyusut drastis. Beratnya implikasi pelabelan menunjukkan betapa kuatnya *buzzer* Presiden. Sejumlah jurnalis, termasuk beberapa pemimpin redaksi, mengungkapkan adanya perekrutan sistematis terhadap para pembuat konten dan persona media sosial guna mendukung pandangan yang pro-rezim.

Penguatan Cengkeraman Eksekutif (*Aggrandizing Executive Power*). Sepanjang periode 2014-2024, ada banyak upaya mengonsolidasikan kekuasaan presiden/eksekutif serta membatasi *checks and balances* terhadapnya. Selama masa jabatan pertamanya, presiden 2014-2024 hanya didukung oleh beberapa partai politik dan karenanya tidak memegang kekuatan mayoritas di parlemen. Pada masa jabatan keduanya, presiden pun membangun koalisi besar, menghasilkan supermayoritas yang mencakup 82% kursi parlemen. Taktik ini secara efektif melucuti parlemen dari peran pengawasannya, sehingga memungkinkan disahkannya aneka UU dan peraturan yang kontroversial dan bermasalah. Selain itu, dengan merangkul partai-partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlementer, koalisi ini mencegah peluang munculnya kekuatan politik ekstra parlementer. Pemerintah juga berusaha mencampuri urusan internal partai oposisi yang tersisa. Pada tahun 2021, kepala staf presiden mencoba mengambil alih salah satu dari dua partai oposisi yang tersisa—meskipun gagal, upaya ini melemahkan struktur partai tersebut dan peran pengawasannya (Mietzner [2024](#), hlm. 4).

Dengan dukungan yang sangat besar dari parlemen, presiden meluncurkan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memungkinkan proyek-proyek pembangunan tertentu mengabaikan analisis dampak lingkungan dan dampak sosial serta peraturan zonasi lokal (Verico et al. [2023](#), Infid [2024](#), hlm. 44). Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2016, hingga 2018 telah ada lebih dari 200 proyek yang ditetapkan sebagai PSN, termasuk pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, bendungan, pembangkit listrik, dll. Meskipun pembangunan infrastruktur mendapatkan pujian dari banyak pihak, beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak PSN menghadapi perlawanan yang signifikan dari masyarakat yang terkena dampak dan dilanggar haknya (Herwati & Wunkana [2023](#), Jong [2020](#), Infid [2024](#)). Agenda pembangunan populis dan neoliberal presiden dikukuhkan melalui UU Cipta Kerja tahun 2020. Ditentang keras oleh sebagian besar AMS, UU ini berujung pada pelemahan yang signifikan terhadap perlindungan lingkungan dan tenaga kerja.

Memasuki masa jabatan keduanya, muncul pula desas-desus "presiden tiga periode" dan penundaan pemilihan umum 2024 (Setijadi [2021](#), Mietzner [2024](#)). Sentimen ini ditentang keras oleh publik, elite penguasa, dan partai politik sang presiden sendiri. Meskipun tidak dapat merambah kekuasaan eksekutif yang lebih besar di tingkat nasional, presiden meraupnya di tingkat lokal, antara lain melalui penunjukan 20 pelaksana tugas gubernur serta 182 pelaksana tugas walikota dan bupati antara tahun 2021 dan 2023. Meskipun Ombudsman menyatakan adanya malpraktik administrasi, penunjukan tersebut tetap berjalan.

Pembungkaman Kritik dan Perbedaan Pendapat (*Quashing Criticism and Dissent*). Ini adalah strategi penyusutan ruang-waktu sipil paling mencolok, yang sebagian besar dilakukan melalui serangan terhadap para aktivis. [Kemitraan](#) melaporkan bahwa antara tahun 2014 dan 2023, terdapat 1.019 kasus ancaman atau serangan terhadap para pembela HAM, termasuk aktivis, jurnalis, dan mahasiswa—yang dampaknya dirasakan oleh 5.475 orang. Serangan ini termasuk 243 serangan fisik (dominan terjadi di paruh pertama), 197 pelecehan yudisial (dominan terjadi di paruh kedua), 149 pengusuran atau pembubaran, 146 teror dan ancaman, dan 140 serangan digital—dengan catatan bahwa beberapa kasus dicatat dalam lebih dari satu kategori. Lebih dari 2.600 kasus serangan terjadi seputar isu Papua, termasuk yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, pertambangan, deforestasi, dan perampasan tanah.

Sebagian besar dari korban serangan fisik dan pelecehan yudisial adalah para aktivis yang bekerja untuk isu-isu HAM, hak-hak masyarakat adat, perampasan tanah, dan lingkungan. Meskipun para aktivis juga rentan terhadap teror dan ancaman serta serangan digital, yang banyak menerima hal ini adalah jurnalis dan akademisi. Menurut [Amnesty International Indonesia](#), jurnalis yang paling rentan adalah yang meliput di daerah-daerah terpencil, meliput isu-isu korupsi, lingkungan, dan pertambangan, serta meliput kasus-kasus yang melibatkan negara atau perusahaan besar. Di kalangan akademisi, pembungkaman dilakukan dengan cara mendiskreditkan penelitian dan opini yang kritis terhadap pemerintah, melarang penelitian dan diskusi tentang topik tertentu, serta kriminalisasi temuan penelitian dengan dalih pencemaran nama baik. Di tempat kerja, taktik lain yang umum dilakukan adalah pemberangusan serikat pekerja. Seperti yang dilaporkan oleh [Lokataru](#), ini biasanya dilakukan dengan menyulut konflik internal dan menyuap pengurus pimpinan serikat pekerja.

Dalam hal penanganan demonstrasi, [PSHK](#) mencatat tiga modus pemolisian: penyisiran dan penangkapan aktivis mahasiswa sebelum kegiatan dimulai, penggunaan kekuatan dan persenjataan berlebihan selama kegiatan berlangsung, dan penangkapan para peserta setelah kegiatan selesai. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan ada perintah “tembak di tempat,” yang terkadang berujung pada pembunuhan ekstrajudisial, seperti dalam kasus Gijik.

Di ranah digital, instrumen utama menindas kritik dan perbedaan pendapat adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama klausul pencemaran nama baik. [Amnesty International Indonesia](#) berpendapat bahwa pembentukan “Polisi Virtual” telah memungkinkan penegakan yang lebih ketat terhadap UU ini, antara lain melalui pengawasan digital. Ada juga upaya menekan *platform* untuk memblokir atau menghapus konten, membatasi *bandwidth* internet, dan bahkan mematikan internet untuk jangka waktu tertentu. Dalam modus yang lebih menasar individu, para aktivis dan jurnalis diretas akunnya, mengalami *doxxing*, dan/atau menerima kekerasan berbasis gender secara daring (KBGO).

Taktik lain yang jarang diperhatikan publik adalah membuat jarak-jarak fisik, terkadang dengan kedok gentrifikasi. Di Jakarta, para pengunjung rasa tidak lagi diizinkan berdiri di trotoar di luar gerbang istana presiden. Mereka harus “mundur” ke Taman Aspirasi di seberang jalan atau ke Patung Kuda beberapa blok dari istana. Ada yang berpendapat bahwa pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan adalah taktik menjauhkan pengunjung rasa dari istana kepresidenan—sebuah taktik yang mengingatkan seorang narasumber akan pemindahan kampus utama Universitas Indonesia dari pusat kota Jakarta ke Depok.

Pengambinghitaman Komunitas Rentan dan Terpinggirkan (*Scapegoating Vulnerable and Marginalized Community*). Strategi ini tidak dapat dilepaskan dari strategi penyebaran disinformasi. Bisa dibilang, yang paling sering dan sistematis dikambinghitamkan selama dekade terakhir adalah kelompok Islamis. Persoalannya, karena beberapa dari mereka punya rekam jejak mengencet kelompok lain, termasuk transpuan, Tionghoa, dan Syiah, hanya sedikit AMS yang bersolidaritas dan pasang badan ketika kelompok-kelompok Islamis ditarget oleh negara (Petz [2021](#), Mietzner [2024](#)).

Penting diingat bahwa ada sejarah diskriminasi berkepanjangan terhadap kelompok ragam SOGIESC, Tionghoa, Papua, dan sejumlah kelompok masyarakat, agama, dan etnisitas di Indonesia. Baru-baru ini, terdapat pula sentimen anti-Rohingya di Aceh. Memang belum ada kekerasan komunal skala besar seperti akhir 1990-an dan awal 2000-an, tetapi kami mengkhawatirkan keengganan birokrat dan aparat keamanan melindungi masyarakat rentan dan terpinggirkan. Meskipun strategi pengambinghitaman ini tidak/belum terlalu sering digunakan, ada kemungkinan para otokrat akan menggunakannya, apalagi mengingat bagaimana AMS tidak selalu bersolidaritas dan pasang badan dengan mereka yang rentan dan dipinggirkan.

Perusakan Pemilihan Umum (*Corrupting Elections*). Selama dua dekade terakhir, terdapat beberapa upaya menghapus pemilihan umum langsung. Yang pertama adalah pada tahun 2014, ketika lembaga eksekutif dan legislatif berusaha menghapus pemilihan kepala daerah secara langsung. Meski penolakan terhadap hal ini cukup masif dan berhasil, isu ini muncul kembali pada tahun 2018 dan 2024. Memang, hingga saat ini gubernur dan walikota masih dipilih langsung oleh rakyat—bagaimanapun, presiden berhasil menunjuk lebih dari 200 pelaksana tugas kepala daerah.

Langkah paling fenomenal dalam merusak pemilihan umum adalah melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2023 yang mengubah batas usia minimum calon kandidat, yang memungkinkan putra sulung presiden ikut bertarung dan akhirnya mendapatkan kursi wakil presiden. Taktik ini tentunya tidak berdiri sendiri. Didukung pelaksana tugas kepala daerah yang ditunjuk presiden serta pencairan dana bantuan sosial, putra sulung presiden menang. Tidak hanya melahirkan dinasti politik baru, langkah ini memungkinkan reinkarnasi dinasti politik Orde Baru—di mana mantan menantu diktator yang berkuasa selama 32 tahun dan memiliki catatan pelanggaran HAM berat terpilih menjadi presiden. Lebih jauh, ada upaya melalui Mahkamah Agung (MA) untuk mengubah batas usia minimum calon gubernur guna memungkinkan putra bungsu presiden ikut serta dalam pemilihan umum gubernur. Kali ini, MK menolak upaya tersebut, menyusul demonstrasi besar-besaran di berbagai penjuru negeri.

Peningkatan Kekerasan (*Stoking Violence*). Dalam strategi ini, taktik paling menonjol adalah penggunaan kekerasan berlebihan oleh polisi. Rincian mengenai meningkatnya kekerasan polisi lima tahun terakhir, khususnya dalam menangani demonstrasi atau membubarkan massa, tersedia dalam laporan [KontraS](#).

Yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah meningkatnya kekerasan oleh aktor-aktor non-negara, yang banyak terjadi di tingkat lokal. Termasuk di dalamnya adalah polisi/pemolisian moralitas di provinsi Aceh dan Jawa Barat, main hakim sendiri terhadap waria/transpuan dan kelompok Kristen di Yogyakarta, penggusuran warga dari tanah milik mereka oleh preman yang direkrut perusahaan, PAM Swakarsa *online* yang melecehkan para aktivis secara daring, dan sebagainya. Beberapa laporan mencatat betapa tindakan-tindakan ini berujung pada polisi yang membiarkan penganiayaan, menindaklanjuti penangkapan oleh kelompok pelaku main hakim sendiri, atau melembagakannya melalui Peraturan Kapolri tahun 2020 tentang PAM Swakarsa. Sejalan dengan itu, Jaffrey ([2020](#), [2021](#)) menguraikan bagaimana main hakim sendiri terhadap kelompok minoritas telah ditoleransi oleh pemerintah daerah dan nasional, dan hingga batas tertentu, oleh masyarakat sipil. Menurutnya, konstitusi Indonesia yang pluralis menyulitkan pembatasan hak-hak minoritas melalui legislasi yang bersifat *top-down*, dan oleh karenanya, main hakim sendiri muncul sebagai strategi ekstra-legal yang menarik guna menggerogoti hak-hak minoritas secara *bottom-up* (Jaffrey, [2021](#), hlm. 245).

Meski sejalan dengan tren global dan Buku Pedoman Otoritarianisme, tidak ada yang “otomatis” dari gelombang ketiga otokratisasi di Indonesia. Ini tidak dapat dipisahkan dari bagaimana gelombang ketiga demokratisasi di Indonesia berjalan pada tahun 1998. Penting diingat bahwa beberapa agenda penting Reformasi tidak tuntas, seperti halnya reformasi sektor keamanan, penanganan pelanggaran HAM masa lalu (termasuk *lustration*, atau pembersihan pemerintahan dari mereka yang terlibat kejahatan berat masa lalu), penghapusan politik patronasi, membangun oposisi yang kredibel, reformasi agraria, keadilan sosial untuk Papua, dll. Perlahan tapi pasti, proses yang tidak tuntas ini memungkinkan “daur ulang elite” (*elite recycling*), di mana elite lama masuk kembali ke lingkaran kekuasaan dan melakukan otokratisasi dari dalam. Sehubungan dengan itu, strategi apapun yang nantinya dipilih guna melawan balik penyusutan ruang-waktu sipil dan mendorong demokrasi perlu memastikan tidak adanya celah bagi otokratisasi untuk terjadi lagi.

Mengingat pentingnya otokratisasi di Indonesia, logika CDA—*connect, defend, act*—tampak masuk akal. Ini bahkan dapat diterjemahkan ke dalam teori perubahan (*theory of change*) yang logis: jika AMS terhubung (*connected*) satu sama lain, dan jika mereka mampu mempertahankan diri (*defend*) dari aneka ancaman digital dan holistik, maka mereka dapat bergerak (*act*) bersama dan secara efektif melawan penyusutan ruang sipil.

Meski begitu, kami mendorong pembacaan CDA secara lateral dan/atau nonlinear. Wawancara kami menunjukkan bahwa banyak AMS langsung bergerak ketika melihat adanya peluang atau ketika harus bertahan dari ancaman. Pilihan bertindak atau bertahan ini kemudian meningkatkan visibilitas mereka sehingga memungkinkan mereka terhubung dengan individu dan lembaga lain. Beberapa narasumber juga merefleksikan bahwa terus menerus bergerak menyuarakan isu tertentu adalah langkah terbaik mempertahankan diri. Sejumlah narasumber dari kelompok ragam SOGIESC berbagi bahwa urutan yang paling sering mereka temui adalah *defend-connect-act*. Sebagai ilustrasi, transpuan dari kelas sosial menengah ke bawah, cenderung tidak memiliki pilihan selain terus menerus mempertahankan diri. Baru setelahnya, upaya-upaya individual ini mereka membuat mereka terhubung satu sama lain, serta terhubung dengan LSM dan komunitas lain di luar mereka.

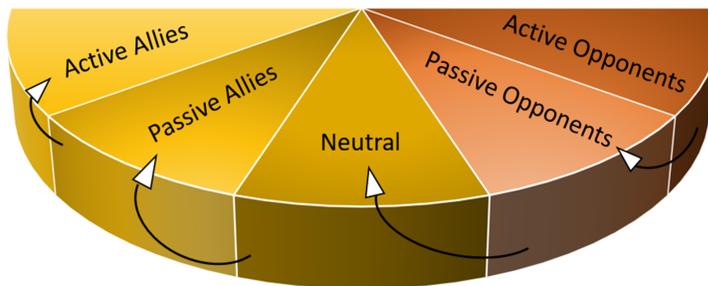
Catatan-Catatan Penting:

- Menyusutnya ruang sipil di Indonesia perlu didudukkan dalam konteks global gelombang ketiga otokratisasi. Di sini, para otokrat dengan lhai memanfaatkan demokrasi untuk masuk ke dalam kekuasaan dan bertahan di dalamnya. Proses mereka mengikis demokrasi berjalan secara sangat lambat. Bagaikan “katak yang direbus,” warga tidak sadar adanya “kenaikan suhu,” hingga tiba-tiba “mendidih.”
- Terinspirasi oleh konsepsi ruang-waktu Einstein, kami menekankan tidak hanya penyusutan berbagai ruang sipil—ruang gerak, ruang hidup, ruang digital, ruang kontestasi, ruang pribadi, dll—tetapi juga penyusutan waktu yang dimiliki AMS untuk terlibat dan memelihara ruang-ruang ini. Tekanan dan tuntutan sehari-hari terhadap masyarakat sipil, termasuk di kalangan mahasiswa, LSM, jurnalis, dan pendidik, secara signifikan mengalihkan perhatian mereka dari perjuangan melawan otokratisasi.
- Ketujuh strategi dari Buku Pedoman Otoritarianisme (*The Authoritarian Playbook*) sudah (atau sedang) diterapkan di Indonesia, dengan berbagai tingkat keberhasilan. Yang paling gamblang adalah strategi membungkam kritik dan perbedaan pendapat; yang cenderung paling berhasil adalah strategi politisasi lembaga independen; yang nyaris berhasil adalah strategi merusak pemilihan umum.
- Meskipun urutan logika CDA yaitu *connect, defend, dan act* masuk akal, kami menawarkan pembacaan terhadap konsep tersebut secara lateral. Dalam beberapa kasus, bergerak (*act*) atau bertahan (*defend*) justru dapat meningkatkan visibilitas AMS dan memungkinkan mereka terhubung (*connected*) satu sama lain di kemudian hari.

Connect

Siapa saja yang dimaksud dengan AMS? Bagaimana posisi mereka satu sama lain? Apa yang memungkinkan atau menghalangi mereka saling berjejaring? Guna memetakan pemahaman narasumber terkait ekosistem aktivisme mereka, kami menggunakan Spektrum Sekutu. Kerangka ini membagi aktor ke dalam lima kategori: sekutu aktif, sekutu pasif, aktor netral, lawan pasif, dan lawan aktif. Kelima kategori tersebut menandakan seberapa dekat atau jauh keberpihakan aktor terhadap perjuangan yang kita usung. Sekutu aktif adalah mereka yang setuju dan ikut berjuang bersama kita; sekutu pasif adalah mereka yang setuju, tetapi tidak ikut berjuang bersama kita; aktor netral adalah mereka yang tidak melibatkan diri; lawan pasif adalah mereka yang tidak setuju dengan kita, tetapi tidak berupaya menghentikan kita; sedangkan lawan aktif adalah mereka yang tidak setuju dan secara aktif menghentikan perjuangan kita. Berpijak pada Studi Perlawanan Nirkekerasan, spektrum ini menawarkan logika bahwa aktivisme adalah upaya menarik aktor-aktor yang ada supaya posisinya menjadi lebih dekat dengan kita. Tanpa adanya dukungan yang cukup, akan sulit bagi AMS mencapai tujuan mereka. Lebih jauh, tanpa mengamankan dukungan yang cukup, tidak mengagetkan jika beberapa aktor bergeser posisinya mendekati lawan. Bisa jadi, sekutu pasif bergeser menjadi aktor netral, dan ini memudahkan lawan mengkooptasi mereka menjadi lawan pasif atau bahkan lawan aktif.

Gambar 5. Spektrum Sekutu



Dimodifikasi dari: Boyd & Mitchell (2012)

Sejumlah studi (Alinsky [1971](#); Popovic dkk. [2007](#); Boyd [2012](#)) menunjukkan kecenderungan di kalangan aktivis dan AMS untuk hanya berinteraksi dengan para sekutu aktif di dalam lingkaran mereka sendiri. Di sini, sekutu pasif pun dianggap tidak layak diajak ikut berjuang. Kecenderungan lain yang sering ditemukan adalah bahwa para aktor di empat posisi lainnya dianggap sebagai bagian dari kubu lawan aktif. Di sini, muncul ilusi bahwa lawan aktif punya kekuatan yang jauh di atas kita.

Merujuk pada hasil wawancara, kami mencoba memetakan bagaimana AMS memetakan lawan aktif, lawan pasif, aktor netral, sekutu pasif, dan sekutu aktif di dalam ekosistem aktivisme mereka. Tampaknya, imajinasi mengenai siapa saja aktor dalam spektrum sekutu cukup sempit. Selanjutnya, kami menggarisbawahi beberapa observasi terkait ekosistem aktivisme AMS: (a) keberagaman ruang-waktu sipil, (b) kebutuhan melibatkan lebih banyak aktor, (c) kohesi AMS, dan (d) urgensi mengetengahkan Papua.

Keberagaman Ruang-Waktu Sipil

Tidak mungkin, dan tentunya reduksionis, membuat satu peta Spektrum Sekutu untuk semua AMS di Indonesia. Spektrum Sekutu di tingkat nasional tentu akan berbeda dengan di tingkat lokal, belum lagi Spektrum Sekutu satu daerah dengan daerah lainnya. Di Yogyakarta misalnya, komunitas SOGIESC memandang LSM lokal yang berfokus pada isu HAM, serta sebagian besar jurnalis lokal, sebagai sekutu aktif. Sedangkan, komunitas SOGIESC di Padang sering mendapati LSM lokal yang berfokus pada isu HAM sebagai sekutu pasif, yang terkadang dapat bergeser menjadi lawan pasif. Pandangan tersebut tidak jauh berbeda dengan pandangan mereka terhadap jurnalis lokal dan LSM yang bekerja di isu kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Salah seorang narasumber menyebutkan bahwa di Sumatera Barat, hanya LBH Padang yang konsisten menunjukkan solidaritas tertinggi sebagai sekutu. Di sini, mereka menerima individu-individu dengan keragaman SOGIESC sebagai kelompok yang hak asasinya perlu dilindungi. Sementara itu, banyak pembela HAM lain masih enggan menunjukkan keberpihakan terbuka terhadap individu dan kelompok ragam SOGIESC, terutama saat kelompok tersebut mendapat serangan. Alasannya beragam—mulai dari kurangnya perspektif keadilan gender, interpretasi yang konservatif terhadap ajaran agama, hingga stigma terkait HIV dan AIDS.

Pemetaan Spektrum Sekutu juga pasti berbeda antar lingkaran isu dan sektor yang berbeda—misalnya demokrasi dan HAM, ragam SOGIESC, konflik industrial, KBB, dll. Contohnya, mahasiswa sering dilihat sebagai sekutu oleh gerakan pro-demokrasi. Namun, di kalangan pengemudi ojek *online*, mahasiswa lebih sering dilihat sebagai pihak netral atau bahkan lawan pasif ketika para pengemudi ini turun ke jalan menuntut bagi hasil yang adil kepada perusahaan.

Sadar akan beragamnya AMS, Forum Masyarakat Sipil Indonesia (*Indonesia Civil Society Forum*, ICSF) baru-baru ini mengubah format acara tahunan mereka—dari yang tadinya langsung mengumpulkan ratusan AMS dari seluruh Indonesia, menjadi berjenjang. Forum didahului serangkaian pertemuan regional guna mengkonsolidasi AMS wilayah Timur (yang mencakup Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara), wilayah Sumatra-Kalimantan, serta wilayah Jawa-Bali. Banyak narasumber mengapresiasi perubahan tersebut karena memudahkan mereka mengidentifikasi isu-isu khas wilayah, untuk kemudian dibawa ke tingkat nasional secara lebih matang. Salah satu isu yang teridentifikasi dari pertemuan regional Jawa-Bali dan Sumatra-Kalimantan adalah UU ITE. Pertemuan regional di kedua wilayah tersebut banyak mengidentifikasi marginalisasi terhadap ragam SOGIESC dan kelompok disabilitas, sehingga muncul rekomendasi spesifik untuk menyelenggarakan pelatihan tentang kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi (GEDI). Sementara itu, yang paling menjadi perhatian di pertemuan regional wilayah Timur adalah akses internet yang rawan dibatasi dan diputus pemerintah, pelanggaran HAM yang masih marak terjadi terutama terhadap Orang Asli Papua (OAP), serta konflik sumber daya alam yang umumnya melibatkan industri pertambangan.

Meski demikian, beberapa narasumber menyatakan bahwa keterbatasan waktu memaksa para peserta pertemuan nasional ICSF memprioritaskan empat isu teratas. Prioritisasi ini cenderung mengesampingkan proses identifikasi isu khas wilayah yang telah dilakukan sebelumnya—contohnya, isu pelanggaran HAM di Papua, isu krisis iklim di pulau-pulau kecil dan daerah pesisir, isu pembangunan ekonomi, isu feminisme, dll. Hal ini tercermin dalam salah satu komentar yang muncul, "Aktivisme di Papua tidak sampai ke Jakarta." Salah satu pendekatan yang barangkali dapat diterapkan adalah dengan menjadikan pertemuan nasional ICSF sebagai ajang membahas isu-isu regional di tengah ekosistem AMS yang lebih luas, alih-alih menjadi ajang di mana isu-isu tersebut sekadar dikompilasi dan diprioritaskan. Ini dapat dilakukan misalnya dengan mengalokasikan sesi atau hari khusus di pertemuan nasional untuk membahas masing-masing wilayah—dengan urutan Timur, Sumatra-Kalimantan, dan Jawa-Bali. Di sini, isu-isu regional didudukkan sebagai kepentingan bersama, dalam semangat solidaritas interseksional, lintas sektoral, dan lintas wilayah.

Semakin Banyak, Semakin Saling Jaga

Ketika diminta mengidentifikasi AMS di Indonesia yang perlu diajak melawan balik penyempitan ruang-waktu sipil, jawaban para narasumber berkisar pada pekerja LSM, staf LBH, dan jurnalis saja. Mereka mengungkapkan frustrasi akan terbatasnya individu dan kelompok yang bergerak bersama mereka, baik di tingkat nasional maupun lokal. Seorang aktivis muda mengungkapkan kekecewaannya terhadap komunitas LSM yang sering kali mereduksi persoalan ini sebagai kurangnya strategi komunikasi yang memadai. Padahal, masalahnya lebih kompleks dari itu. Semua narasumber sepakat akan pentingnya melibatkan lebih banyak aktor dalam merawat ruang-waktu sipil, dan kami pun mendorong mereka berpikir lebih dalam mengenai siapa saja yang bisa diajak “masuk barisan.”

Sejumlah narasumber menggarisbawahi betapa buruh merupakan salah satu sekutu tertua gerakan pro-demokrasi di Indonesia. Mereka menegaskan perlunya mempererat aliansi dengan kelompok buruh, sembari memperluasnya ke pekerja *gig* dan asisten rumah tangga. Juga, mereka mengatakan bahwa AMS di Indonesia perlu lebih tegas membela hak-hak pekerja—misalnya dengan bersuara menentang pemberangusan serikat (*union busting*), ikut menghadiri aksi-aksi protes pekerja, atau setidaknya mengamplifikasi solidaritas terhadap aksi-aksi tersebut di sosial media (alih-alih mengeluh soal jalanan yang macet dan layanan yang terhambat karena demonstrasi atau mogok kerja). Beberapa narasumber juga menggarisbawahi beberapa langkah realistik guna melibatkan para pekerja kantoran. Mengingat mereka biasanya tidak dapat secara fisik menghadiri aksi di jalanan, mereka dapat didorong berkontribusi secara finansial menurut kemampuan masing-masing.

Beberapa narasumber menekankan pentingnya melibatkan kalangan pendidik. Di tengah penghasilan yang tidak memadai, banyak guru terjerat utang maupun pinjaman *online* (pinjol) dan menjadi sasaran empuk kekerasan oleh penegak hukum. Staf pengajar maupun tenaga kependidikan di tingkat universitas pun mengalami kesulitan ekonomi. Di tengah tuntutan mencari penghasilan sampingan, waktu dan energi yang sedianya digunakan untuk melatih daya kritis dan tugas kewargaan para siswa menyusut secara signifikan. Di sini, ruang-waktu sipil menyempit bahkan tanpa perlu ada pembatasan kebebasan akademik.

Sejumlah narasumber juga mengidentifikasi kemungkinan menjadikan para petugas kesehatan sebagai sekutu, apalagi daya kritis mereka sudah mulai terpupuk saat Covid-19 melanda. Sebagai garda terdepan melawan krisis kesehatan global, tenaga kesehatan terpaksa keluar dari zona nyaman profesi mereka dan “terpapar” pada aneka ketidakadilan sosial di masyarakat, yang tentunya juga berdampak pada mereka. AMS perlu merangkul petugas kesehatan untuk “masuk barisan,” dengan tetap membuka mata akan keberagaman dan hierarki di dalam sektor kesehatan—terutama seputar identitas kelas dan gender.

Para narasumber menunjukkan pandangan yang beragam terkait institusi keagamaan. Beberapa menekankan pentingnya melakukan fraternisasi terhadap komunitas masjid dan gereja mengingat luasnya jangkauan mereka, yang memungkinkan penyebaran pesan secara lebih efisien kepada publik. Selain itu, reputasi baik mereka dapat menangkal stigma buruk yang sering diasosiasikan dengan gerakan sosial. Namun, beberapa narasumber lain mengekspresikan keraguan mereka merangkul institusi keagamaan mengingat sikap-sikap misoginis dan homofobik, serta keterlibatan institusi keagamaan dalam industri ekstraktif dan pertambangan. Meski demikian, semua narasumber sepakat Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) merupakan sekutu aktif karena selalu menawarkan interpretasi feminis dan inklusif terhadap Al-Qur’an. Ini menjadi bahan bagi individu dan komunitas yang terpinggirkan untuk mementahkan pandangan diskriminatif terhadap mereka. Jaringan lain yang dianggap berpotensi mempromosikan solidaritas interseksional adalah Koalisi KBB.

Cukup mengejutkan bahwa para narasumber tidak langsung mengidentifikasi mahasiswa dan pelajar sebagai sekutu aktif—meskipun mahasiswa sering kali menyumbang massa terbesar dalam demonstrasi dan pelajar mulai sering berpartisipasi dalam aksi massa. Dalam pandangan beberapa narasumber, perputaran orang di kalangan kampus dan sekolah cukup cepat sehingga butuh banyak waktu dan tenaga untuk terus mengajak, merekrut, membimbing, dan mengorganisasi angkatan-angkatan baru. Narasumber lain menggarisbawahi kecenderungan mahasiswa memprioritaskan kegiatan pertukaran pelajar, magang, atau mengejar IPK tinggi sehingga waktu dan minat mereka bergabung ke dalam gerakan pun semakin kecil. Semua narasumber sepakat bahwa perlu ada pendekatan yang lebih sistematis untuk menghubungkan (dan menjembatani) mahasiswa dengan gerakan-gerakan keadilan sosial di Indonesia. Di sini, LSM dapat membuka lowongan-lowongan magang untuk mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sementara LBH dapat melibatkan mahasiswa Hukum dalam mempersiapkan kasus litigasi di pengadilan. Secara umum, berbagai organisasi dan gerakan sosial juga dapat menyasar mahasiswa-mahasiswa dari rumpun ilmu lain dengan, misalnya, mengajak mahasiswa Kedokteran dan Psikologi memberikan pertolongan pertama dan dukungan kesehatan mental, melibatkan mahasiswa Ilmu Komunikasi dan Sastra dalam proses-proses penulisan dan aktivitas diseminasi ke publik, dan berkolaborasi dengan mahasiswa Teknik dan Ilmu Komputer guna meningkatkan keamanan digital organisasi. Cara lain adalah mengintegrasikan ide-ide tersebut ke dalam mata kuliah dan/atau membajak skema MBKM. Di sini, inisiatif pemerintah menghubungkan mahasiswa dengan dunia korporat diubah menjadi skema yang memfasilitasi keterlibatan bermakna mahasiswa dalam pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keadilan sosial.

Selain mahasiswa, penting juga menyasar demografi orang muda secara lebih luas. Riset menunjukkan bahwa 71% dari kelompok Gen Z dan 60% dari kelompok Milenial memberikan suara untuk presiden terpilih 2024 (Ulya & Rastika [2024](#)). Angka ini menunjukkan bagaimana pemerintah berhasil menarik banyak pemuda menjadi sekutu aktifnya kendatipun pemerintah sering melibatkan orang muda secara dangkal, merendahkan, dan *youth-washing*. Beberapa narasumber juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas orang-orang muda pedesaan sehingga mereka dapat tetap tinggal atau kembali tinggal di desa mereka, tanpa merasa perlu pindah ke kota-kota besar guna mencari penghidupan yang lebih baik. Beberapa lainnya juga menyarankan pendekatan terhadap klub-klub berbasis hobi atau *fandom* supaya lebih banyak orang muda dapat masuk Spektrum Sekutu.

Bicara soal klub, sejumlah narasumber melihat peluang yang besar melibatkan fans sepak bola dan *gamer online* ke dalam Spektrum Sekutu. Sebagian besar anggota kedua kelompok tersebut pernah tersakiti oleh negara—misalnya pemolisian berlebihan dan mematikan di Stadion Kanjuruhan yang berujung kematian 131 penonton sepak bola dan penangguhan beberapa *platform online game*.

Banyak narasumber mengutarakan perlunya berkolaborasi dengan seniman, komedian, dan *influencer* media sosial. Mereka melihat bahwa individu-individu tersebut dapat membantu menarik perhatian publik, sekaligus melawan upaya pemerintah yang memanfaatkan selebriti dalam menggiring opini-opini publik.

Mempertimbangkan betapa kelompok-kelompok minoritas seperti Tionghoa, Papua, dan ragam SOGIESC rawan dikambinghitamkan, penting bagi AMS melibatkan mereka sebagai sekutu, sebagai bagian dari tanggung jawab saling jaga dan saling peduli. Jika terhubung dengan semakin banyak AMS, kelompok minoritas akan memiliki lapisan perlindungan tambahan, mengingat AMS di sekitar mereka tidak akan terpengaruh disinformasi dan provokasi kekerasan.

Di tengah bagi-bagi kursi politik dan proyek pembangunan antara eksekutif dan legislatif, penting memastikan supaya para aktor yudikatif tidak ikut bersekongkol. Serangkaian pemogokan dan demonstrasi oleh para hakim baru-baru ini membuka peluang bagi AMS mendekati aktor-aktor yudikatif serta memastikan mereka tetap menjadi aktor netral atau bahkan sekutu aktif dalam perjuangan keadilan sosial.

Apresiasi khusus kami tujukan kepada para aktivis iklim muda. Dibandingkan kelompok lain, merekalah yang paling terampil menjalin solidaritas lintas sektoral. Kampanye mereka, terutama di media sosial, dengan mahir membingkai HAM, hak perempuan, hak SOGIESC, hak masyarakat adat, KBB, perampasan tanah, UU Cipta Kerja, dll, sekaligus sebagai isu keadilan iklim. Selain itu, kepiawaian mereka dalam mengaitkan perspektif lokal, nasional, regional, transnasional, dan global memberikan mereka ruang untuk menjalin jaringan yang semakin meluas.

Menguatkan Kohesi

Salah satu tema yang sering muncul dalam wawancara kami adalah keterputusan pusat-daerah. Para narasumber lokal menekankan bahwa apa yang mendesak di Jakarta belum tentu menjadi prioritas yang paling mendesak di daerah-daerah lain. Tapi, mereka merasa bahwa selalu ada dorongan yang lebih kuat bagi AMS lokal untuk mendukung apapun yang terjadi di tingkat nasional. Atau, ketika LSM nasional melaksanakan program atau kegiatan di luar Jakarta, AMS lokal diharapkan menyediakan dukungan, yang sebenarnya menguras waktu dan energi. Selain itu, mereka melihat bagaimana isu-isu nasional sering kali menyedot sebagian besar perhatian publik sehingga isu lokal, terutama dari daerah pedesaan dan terpencil, semakin jarang didengar, apalagi didukung luas oleh publik.

Di masing-masing daerah, ketidakkompakan antar AMS muncul dari persaingan antara mereka yang bekerja pada isu yang sama, atau dari "ego sektoral" antara mereka yang bekerja pada isu yang berbeda. Separuh narasumber kami mengilustrasikan betapa LSM bersaing satu sama lain guna mendapatkan pendanaan, atau betapa jurnalis bersaing guna mendapatkan kesempatan *fellowship*. Mereka juga membahas betapa sulitnya melibatkan LSM di luar fokus isu mereka, mengingat masing-masing sudah kewalahan dengan beban pekerjaan sendiri hingga tidak ada energi tersisa guna menambah beban baru.

Sejumlah narasumber memandang bahwa ketidakkompakan ini tidak didasarkan kepada persoalan pragmatis, seperti persaingan dan kekurangan waktu. Menurut mereka, persoalannya cenderung ideologis dan berkaitan dengan kurangnya komitmen terhadap interseksionalitas. Secara khusus, seorang jurnalis berpandangan bahwa tidak semua media bersedia "memikul" tanggung jawab kolektif dan "meminjamkan" *privilege* kepada mereka yang lebih terpinggirkan. Takut kehilangan pembaca dan/atau pemirsa, beberapa media yang dianggap "progresif" pun terkadang memilih bermain aman dengan tidak secara eksplisit mendukung isu-isu perempuan dan kelompok ragam SOGIESC. Sementara itu, beberapa narasumber berpendapat bahwa kurangnya kohesi di antara AMS lebih berkaitan dengan kurangnya kesadaran kelas. Mereka menyebutkan bagaimana staf LSM, akademisi, dan pegawai kantorannya melihat diri mereka sebagai "pekerja" dan bukan "buruh," dan ini menyulitkan pembentukan aliansi dan solidaritas dengan buruh pabrik, pekerja *gig*, petani, nelayan, dan sejenisnya.

Mengadopsi salah satu kajian penting dalam Studi Etnisitas, penting memastikan supaya kohesivitas di antara AMS lebih bersifat "menjembatani" (*bridging*), alih-alih "mengikat" (*bonding*).

"Menjembatani" mengacu pada interaksi dan modal-modal sosial yang mempertemukan orang-orang dari latar belakang etnis, agama, kelas, usia, dll yang berbeda, sementara "mengikat" mengacu pada memperkuat hubungan antara orang-orang dari latar belakang identitas yang sama (Varshney 2002). Modal sosial model "jembatan" ini perlu dikembangkan baik di tingkat sehari-hari maupun di tingkat asosiasi formal. Meskipun interaksi lintas kelompok tidak menjamin bahwa kelompok-kelompok yang berbeda akan saling memahami dan saling setuju dengan satu sama lain, interaksi ini tetap membantu mencegah kekerasan antarkelompok terjadi dalam situasi-situasi konflik, kesalahpahaman, serta misinformasi, disinformasi, dan provokasi.

Mengetengahkan Papua

Membaca ulang laporan tahun [2002](#) yang pernah diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada dan Universitas Harvard, kami menyayangkan bahwa rekomendasi-rekomendasi dari studi tersebut masih sangat relevan hingga saat ini, yang artinya, tidak terjadi banyak perubahan di Papua selama dua dekade terakhir. Bagaimanapun, di tingkat permukaan, ada kesan bahwa telah terjadi banyak perkembangan baik, antara lain seputar pembangunan infrastruktur dan tata pemerintahan, terutama melalui *pemekaran daerah*.

Di tengah penyusunan laporan akhirnya (terbit 2025), Papuan Democratic Institute membagikan beberapa temuan mereka seputar penyusutan ruang sipil di Papua. Mereka menekankan bahwa ruang sipil sebenarnya tidak pernah ada secara formal di Papua sejak integrasi, meskipun ada perubahan dan lebih terbuka di tahun 1999–2000an (Chauvel menyebutnya sebagai Papuan Spring). Proses integrasi yang menggunakan pendekatan militer menempatkan Papua sebagai zona militerisasi dan Daerah Operasi Militer yang tidak membuka celah untuk masyarakat sipil. Integrasi Papua ke Indonesia dengan versi ini tentu saja sangat berbeda dengan wilayah lain di Indonesia mengingat Papua berkenalan dengan Indonesia melalui proses militerisasi. Di sini, Papuan Democratic Institute mengajak bertanya kembali, apakah tepat menggunakan konsep penyusutan ruang sipil dalam konteks konflik Papua.

Tentang *pemekaran daerah*, narasumber kami menggarisbawahi betapa kebijakan ini gagal memenuhi janji mendekatkan layanan publik kepada masyarakat Papua. Mereka menekankan bagaimana program ini justru mencengkeram lebih jauh ruang-waktu sipil di Papua. Sudah tanahnya diambil, keanekaragaman hayati dan pengelolaannya pun kini semakin dicerabut dari komunitas-komunitas adat. Dengan tingkatan yang berbeda-beda, AMS pun jadi menghabiskan waktu mengurus daerah-daerah administrasi baru hasil pemekaran—ada yang melakukannya dalam rangka membela pemekaran, ada yang melakukannya dalam rangka memanfaatkan pemekaran sebagai sesuatu yang menguntungkan masyarakat, dll.

Catatan-Catatan Penting:

- Mengingat beragamnya ruang-waktu sipil di Indonesia, penting memastikan supaya Spektrum Sekutu senantiasa dipertarakan di berbagai lingkaran, baik berdasarkan wilayah, isu, maupun koalisi.
- Gerakan pro-demokrasi harus melibatkan lebih banyak aktor, di luar yang "itu-itu saja." Penting melibatkan ragam kelompok pekerja dan buruh (guru, petugas kesehatan, pekerja *gig*, pekerja domestik, dll), mahasiswa, pemuda, seniman, dll. AMS perlu lebih aktif melakukan *brokering*, dengan orientasi membentuk aliansi yang lebih bersifat menjembatani daripada mengikat, serta perlu lebih eksplisit menyatakan solidaritas interseksional.
- Beberapa faktor yang mengganggu kohesi antar AMS adalah keterputusan pusat-daerah (di mana isu dan pandangan nasional cenderung mengesampingkan kepentingan-kepentingan lokal), persaingan sumber daya, kurangnya perspektif keadilan gender, kurangnya komitmen terhadap interseksionalitas, dan minimnya kesadaran kelas.
- Segala upaya melawan balik otokratisasi perlu mengetengahkan Papua. AMS tidak boleh kembali ke pendekatan masa Reformasi yang mengasumsikan bahwa "kalau demokrasi sudah tercapai, isu Papua jadi lebih mudah ditangani," dan berujung pada deprioritasi atau bahkan peminggiran persoalan Papua.

Defend

Apa yang sudah dilakukan oleh AMS guna melawan balik penyusutan ruang sipil? Apa yang menunjang atau justru menghalangi mereka melakukannya secara efektif? Guna memetakan pemahaman narasumber mengenai strategi dan kapasitas AMS, kami meminjam kerangka Titik Intervensi yang dikembangkan di kalangan Studi Perlawanan Nirkekerasan. Kerangka ini menggambarkan enam titik di mana AMS dapat "mengganggu" bekerjanya suatu sistem: titik produksi, titik destruksi, titik konsumsi, titik keputusan, titik asumsi, dan titik kesempatan—masing-masing diuraikan oleh Reinsborough dan Canning (2017) sebagai berikut.

Titik produksi adalah tempat suatu produk dibuat, misalnya pabrik dan perkebunan. Titik destruksi adalah tempat sumber daya diekstraksi dan/atau kekerasan fisik dilakukan, termasuk di dalamnya adalah hutan dan situs-situs tambang. Titik konsumsi adalah tempat barang dan jasa diperjualbelikan, misalnya toko, pasar, dan loket pelayanan. Titik keputusan adalah tempat para pemegang kekuasaan mengambil keputusan, termasuk istana kepresidenan, gedung parlemen, ruang pengadilan, dan kantor perusahaan. Titik asumsi adalah tempat di mana narasi dominan dan legitimasi lawan bersemayam, termasuk di dalamnya ideologi, kurikulum, dan artefak budaya populer. Terakhir, titik kesempatan adalah momen-momen yang dapat dimanfaatkan untuk menarik perhatian massa, misalnya peringatan hari tertentu, kunjungan tokoh penting, atau hari libur nasional. Meminjam logika dari Studi Perlawanan Nirkekerasan, pemetaan Titik Intervensi menggarisbawahi betapa aktivisme adalah soal menempatkan tekanan pada titik-titik vital lawan.

Gambar 6. Titik Intervensi



Sumber: The Commons Social Change Library 2017

Berpijak pada Titik Intervensi, kami mengulas empat pengamatan penting: (a) barisan pertahanan yang renggang, (b) pekerjaan sampingan penuh waktu yang menguras tenaga, (c) kebutuhan mengintensifkan perlawanan, dan (d) kebutuhan pengembangan kapasitas AMS.

Barisan Pertahanan yang Renggang

Menyimak aneka laporan yang ada dan semua jawaban narasumber, kami melihat bahwa AMS di Indonesia cenderung berfokus pada titik keputusan dan titik destruksi. Mereka yang bekerja untuk isu demokrasi dan HAM misalnya, sangat sering menarget titik keputusan, yaitu dengan melakukan aksi dan demonstrasi di depan gedung-gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka yang memperjuangkan hak-hak pekerja—baik buruh, pekerja *gig*, asisten rumah tangga, guru, wartawan, supir, dan sebagainya—juga lebih sering melakukan aksi di titik keputusan, alih-alih di titik produksi. Sementara itu, yang sering memanfaatkan titik destruksi, seperti di desa, lahan pertanian, hutan, dan sebagainya, biasanya adalah yang bekerja untuk isu-isu lingkungan dan menentang perampasan tanah. Jika dilihat dari sudut pandang lawan, aksi protes yang dilancarkan AMS cukup mudah ditebak, terutama seputar titik atau lokasi mana saja yang akan ditarget. Karenanya, tidak mengherankan jika lawan dapat mengantisipasi dan mematahkan perlawanan AMS.

Sementara itu, kampanye digital sangat membantu mengintensifkan tekanan pada titik asumsi. #ReformasiDikorupsi, #SemuaBisaKena, dan #DaruratDemokrasi cukup berhasil menantang narasi dominan bahwa demokrasi Indonesia baik-baik saja. Adapun DPD, Extinction Rebellion Indonesia, dan lainnya mencoba membongkar bahwa aktivisme nirkekerasan bukan tindakan kriminal, melainkan ekspresi kecintaan warga terhadap negaranya. Yang juga perlu dibongkar adalah asumsi bahwa konstitusi ada untuk mengendalikan warga negara, karena sejatinya konstitusi adalah alat untuk membatasi kekuasaan (penyelenggara) negara. Meskipun sebagian besar narasumber memandang pembentukan (ulang) wacana ini penting, beberapa merasa bahwa masyarakat sipil belum berhasil secara efektif melawan narasi negara yang didorong secara agresif melalui *buzzer* bayaran.

Sejumlah gerakan telah memanfaatkan titik kesempatan dengan baik, misalnya dengan menyelenggarakan Women's March dan peringatan Hari Perempuan Internasional pada bulan Maret, kampanye HAM pada bulan September dan Desember, serta menggelar demonstrasi di acara-acara kenegaraan, seperti pertemuan G20 di beberapa kota di Indonesia. Meskipun pendayagunaan titik kesempatan berpeluang menarik lebih banyak perhatian publik terhadap isu yang disoroti, sayangnya hal ini juga memungkinkan lawan mengantisipasi dan memantahkan langkah para aktivis.

Cukup jelas bahwa AMS di Indonesia lebih banyak berkonsentrasi pada titik keputusan. Ketika menarget titik destruksi, pendekatannya cenderung kurang lintas sektoral, di mana yang terlibat hanyalah AMS yang terdampak langsung. Titik asumsi dan titik kesempatan, sayangnya, belum dimanfaatkan secara efektif. Titik lain yang juga kurang dimanfaatkan adalah titik produksi dan titik konsumsi. Dengan mempertimbangkan ketergantungan rezim petahana terhadap bisnis, intervensi pada dua titik ini nampaknya menjanjikan. Tentu saja, pertanyaan pentingnya adalah: bagaimana mendorong AMS melebarkan sayap di luar titik keputusan dan menjangkau lima titik intervensi lainnya ketika tidak ada banyak sekutu yang dapat turun tangan? Di sini, kita kembali pada persoalan yang diulas di bab *Connect*, khususnya tentang bagaimana melibatkan lebih banyak pemain ketika tidak punya cukup imajinasi tentang siapa (lagi) yang bisa dilibatkan.

Pekerjaan Sampingan Penuh Waktu yang Melelahkan

Kami menangkap adanya rasa frustrasi di kalangan AMS terhadap fakta bahwa mereka (kita!) belum berhasil memutarbalik otokratisasi di Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa AMS telah bekerja dengan cukup baik dalam memperlambat prosesnya. Kembali ke bab Gambar Besar, beberapa taktik otoriter berhasil digagalkan, termasuk upaya menghapus pemilihan umum langsung. Di tengah

masifnya pergerakan para otokrat, AMS mengemban tugas berat mempertahankan demokrasi di tengah profesi sehari-hari mereka sebagai pekerja LSM, jurnalis, pengasuh, seniman, akademisi, mahasiswa, pemuka agama, pemimpin masyarakat, orang tua, dan sebagainya.

Secara umum, kami mengamati lima mekanisme yang dilakukan oleh AMS guna mendorong agenda demokrasi dan melawan otokratisasi. Masing-masing mekanisme diwarnai faktor-faktor yang memungkinkan AMS memperlambat laju otokratisasi maupun faktor-faktor yang membuat sulit bagi AMS melakukannya.

Mekanisme pertama berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di ruang publik. Dalam pandangan kami, kualitas ruang-waktu sipil ditentukan dan dibentuk oleh masyarakat sipil yang mendedikasikan waktu untuk menghidupkan dan menjaganya. Artinya, "hanya" dengan meluangkan ruang dan waktu melakukan kesehariannya, AMS sudah menjalankan tugas kewargaan penting. Ini termasuk mengintegrasikan kerja kewargaan dalam profesi mereka, melibatkan diri dalam isu-isu keadilan sosial, dan menghadiri kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti rapat desa, ronda, konser musik, protes bersama, dan sebagainya. Hanya dengan terus melakukan hal-hal yang sudah dilakukan sehari-hari, AMS sudah menjaga garis pertahanan dari laju otokratisasi.

Tentu saja, beberapa AMS terlibat secara lebih aktif dalam mendukung dan membela demokrasi, seperti LBH dan LSM di bidang HAM, serta mereka yang bekerja pada isu-isu inklusi sosial, hak-hak ekonomi, keadilan iklim, dan sebagainya. Melalui advokasi, pelatihan, penjangkauan, penggalangan dana, pelayanan saling jaga (*caregiving activities*), dan semacamnya, mereka sudah menjalankan apa yang Gramsci sebut sebagai "perang posisi" (*war of position*) melawan para otokrat, yaitu dengan menantang hegemoni para otokrat berikut segala narasi populis dan neoliberal mereka.

Mekanisme kedua adalah menyuarakan agenda-agenda demokrasi melalui partai politik, baik bergabung yang sudah ada atau membentuk yang baru. Meskipun menjadi jalur penyampaian informasi yang formal dan efektif di sebagian besar negara demokratis, mekanisme ini belum (tidak?) berhasil di Indonesia. Salah satu alasan utamanya adalah kecenderungan "kekosongan ideologi" dalam sistem kepartaian di Indonesia. Di sini, sebagian besar partai politik menjadi kendaraan belaka bagi para politisi dan pebisnis guna memenuhi aspirasinya akan kekuasaan, bukannya sarana mewujudkan aspirasi berbasis ideologi atau isu. Meski Reformasi 1998 sempat melahirkan lebih dari 90 partai politik, terjadi penyusutan yang signifikan, bukan hanya dari segi jumlah partai politik, tetapi juga rentang ideologi dan isu yang mereka usung. Fakta bahwa sebagian besar partai politik bersedia dan nyaman bergabung dalam koalisi supermayoritas—alih-alih menjadi oposisi—menunjukkan betapa perhitungan politik mereka lebih didorong pragmatisme, bukannya kesetiaan terhadap prinsip-prinsip yang melekat pada ideologi atau isu masing-masing. Partai Buruh dan Partai Solidaritas Indonesia yang awalnya sangat berbasis isu pun akhirnya menjadi bagian koalisi. Kondisi kepartaian ini diperparah oleh upaya eksekutif memperkuat cengkeramannya, sebagaimana dibahas dalam bab Gambaran Besar. Pada titik ini, kita nantikan apakah Partai Hijau Indonesia dapat menjadi kendaraan bagi AMS mempromosikan agenda-agenda demokrasi ataukah merangkul pragmatisme seperti partai politik lainnya. Dalam salah satu publikasinya, [Pamflet](#) menunjukkan adanya kepercayaan dan harapan di kalangan orang muda terhadap Partai Hijau, khususnya karena politik hijau yang diusungnya ditopang oleh aktivisme panjang Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) serta struktur tata kelola heterarkis (egaliter) dan holakrasi (terdesentralisasi).

Mekanisme ketiga adalah bergabung atau menjadi konsultan bagi eksekutif. Mengingat bahwa presiden terpilih 2014 dianggap sebagai tokoh independen dari luar lingkaran politik, banyak AMS membangun hubungan dekat dengan eksekutif, dengan asumsi hubungan tersebut akan memberi mereka kesempatan untuk sumbang saran dalam tata kelola pemerintah. Harapan ini goyah, bahkan sejak masa jabatan pertama, seiring tidak banyaknya kemajuan di bidang demokrasi dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Pada titik tertentu, muncul keretakan hubungan antara AMS yang masuk pemerintahan dan yang bertahan di luar. Ditopang koalisi supermayoritas, aliansi

kuat dengan pemodal, dan pendekatan populis, presiden pun dapat melanjutkan masa jabatan kedua tanpa banyak dukungan dari AMS, yang pada akhirnya makin mempersempit pengaruh AMS dalam advokasi kebijakan.

Mekanisme keempat adalah memanfaatkan mekanisme yudisial, mulai dari menuntut peninjauan kembali (*judicial review*) terhadap peraturan-peraturan yang bermasalah hingga mengajukan tuntutan terkait pelanggaran hukum oleh aparat pemerintah. Salah satu kemenangan kecil yang diperoleh AMS melalui mekanisme yudisial adalah [pembatalan](#) tiga pasal tentang penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik oleh MK pada tahun 2024. Gugatan ini diajukan oleh Haris Azhar, Fathia Maulidiyanti, YLBHI, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dengan alasan pasal-pasal tersebut telah disalahgunakan untuk [mengkriminalisasi](#) para pegiat HAM dan antikorupsi, jurnalis, dan mereka yang mengkritik pejabat negara. Pada bulan yang sama, sejumlah LSM di bidang perikanan dan kelautan juga mencatat kemenangan setelah MK menolak gugatan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) untuk [mencabut](#) pasal-pasal dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Putusan MK ini menjadi preseden progresif bagi AMS yang secara aktif melindungi ruang ekologis dan wilayah pesisir, seperti Wawonii dan Sangihe, dari keserakahan industri ekstraktif. Menurut kami, AMS dapat memanfaatkan mekanisme yudisial ini secara lebih optimal, sehingga setidaknya "membanjiri" ruang-waktu lawan, sebagaimana lawan selama ini merecoki ruang-waktu AMS melalui taktik-taktik pelecehan yudisial.

Mekanisme terakhir adalah melalui politik informal, baik secara fisik turun ke jalan maupun secara digital menggunakan gawai menyerukan perubahan. Seperti diuraikan di sub-bab selanjutnya, jumlah perlawanan nirkekerasan dan aktivisme digital di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan ketidakpercayaan publik yang kian meningkat terhadap politik formal, terutama politik partai dan bergabung dengan eksekutif.

Dari kelima mekanisme di atas, mekanisme kedua (partai politik) dan ketiga (bergabung dengan eksekutif) terbukti tidak berhasil. Di titik ini, kami ingin menunjukkan ketimpangan di mana para otokrat mengikis demokrasi sebagai bagian dari pekerjaan penuh waktu mereka, sementara AMS membela demokrasi sebagai tambahan dari pekerjaan penuh waktu yang mereka miliki. Agar tidak terlalu membebani AMS, tugas kewargaan mempertahankan ruang-waktu sipil yang menyempit harus ditanggung bersama oleh lebih banyak orang, dan diperluas ke tiga mekanisme lainnya.

Mengintensifkan Pertarungan

Bagian ini membahas mekanisme terakhir dari lima yang diperkenalkan di atas, yaitu perlawanan nirkekerasan, baik secara fisik maupun digital. Penting dicatat bahwa perlawanan nirkekerasan cukup marak di Indonesia, baik dalam bentuk konvensional maupun digital. Pangkalan data [DPD](#) mencatat 15.073 perlawanan nirkekerasan di Indonesia antara tahun 1999 hingga 2023, sementara penelitian [Fajar et.al.](#) mengidentifikasi hampir 3.873 aktivisme digital antara tahun 2016 hingga 2021.

Sebagaimana dielaborasi oleh DPD, perlawanan nirkekerasan di Indonesia memiliki repertoar sempit dan intensitas rendah. 75% aksi perlawanan di Indonesia mengandalkan 10 metode saja, dari 198 metode aksi nirkekerasan yang ada (Sharp [1973](#)), sebagian besar dalam bentuk "paket kombo" unjuk rasa, demonstrasi, poster, dan pidato (DPD [2024](#)). Selain itu, DPD juga mencatat bahwa 88% aksi perlawanan menggunakan metode protes dan persuasi, di mana para aktivis "hanya" mengekspresikan dukungan atau ketidaksetujuan mereka terhadap suatu isu, misalnya melalui demonstrasi, petisi, atau pertunjukan seni. Hanya 4% dan 6% yang menggunakan metode nonkooperasi dan metode intervensi. Nonkooperasi adalah metode di mana para aktivis tidak hanya mengekspresikan ketidaksetujuan mereka, tetapi juga menarik diri dari hal-hal yang tidak mereka setujui, misalnya melalui boikot, mogok kerja, dan divestasi. Sementara itu, intervensi terdiri dari

metode-metode di mana para aktivis tidak hanya mengekspresikan ketidaksetujuan dan menarik diri dari partisipasi, tetapi juga secara aktif menghentikan atau mendisrupsi hal-hal yang tidak mereka setuju, misalnya dengan melakukan blokade, pendudukan fisik, atau menciptakan sistem-sistem alternatif.

Tren serupa juga terlihat dalam aktivisme digital, di mana para aktivis dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkat: penonton, peralihan, atau petarung (lihat George dan Leidner [2019](#)). Sebagian besar bentuk aktivisme digital yang diidentifikasi oleh [Fajar et al.](#) masuk dalam kategori penonton, di mana para aktivis digital hanya menyukai atau membagikan konten orang lain, atau memproduksi konten mereka sendiri. Hanya sedikit yang berada di kategori peralihan, di mana aktivis digital mengorganisasikan petisi elektronik, penggalangan dana, pemboikotan, dan/atau melakukan *botivisme* (aksi digital terotomasi). Lebih sedikit lagi yang berada di kategori petarung, di mana aktivis digital melakukan aktivisme data, ekspose, atau *hacktivism*.

Kami mendorong supaya situasi di atas dibaca dalam bingkai "gelas yang setengah penuh" (*the glass is half full*). Dengan kata lain, kami mendorong supaya AMS menggeser perhatiannya pada metode-metode intensitas tinggi yang selama ini belum dimanfaatkan. Salah satunya adalah pengamanan sipil tak bersenjata (*unarmed civilian protection*, [UCP](#))—sebuah aksi langsung yang sudah terbukti efektif meningkatkan keselamatan kelompok-kelompok rentan (perempuan, anak-anak, orang tua, pengungsi, etnis dan agama minoritas, dll) di Irak, Filipina, Sudan, Sudan Selatan, Ukraina, dan belahan dunia lainnya.

Kami percaya bahwa mengaplikasikan metode-metode baru akan memberikan efek kejutan yang sangat dibutuhkan dalam perlawanan nirkekerasan, khususnya untuk menggoyahkan keseimbangan lawan. Salah satu hambatan yang harus dilampaui, menurut beberapa narasumber adalah fenomena "abang-abang," di mana para aktivis senior laki-laki secara asertif (bahkan *patronizing*) mengarahkan aktivis lebih muda untuk melakukan perlawanan sebagaimana dilakukan di masa lalu. Hambatan lain adalah mentalitas "sopan" terhadap mereka yang berkuasa. Di sini, Asfinawati menggarisbawahi supaya AMS berfokus pada "etika, bukan etiket." Artinya, kesopanan perlu diposisikan ulang sebagai bagian dari etika politik—sebagai bentuk solidaritas dengan mereka yang tertindas, menuntut pertanggungjawaban dari pemegang kekuasaan—bukan keengganan menimbulkan rasa tidak nyaman, apalagi di kalangan mereka yang telah melanggar etika terhadap kelompok yang tertindas dan terpinggirkan.

Pengamanan Sipil Tak Bersenjata

Pengamanan Sipil Tak Bersenjata (*Unarmed Civilian Protection/UCP*) adalah praktik pengamanan warga sipil oleh warga sipil, dengan mengutamakan kepemimpinan dan pengambilan keputusan oleh komunitas yang bersangkutan. UCP mengadopsi serangkaian metodologi yang memungkinkan warga sipil yang sudah menerima pelatihan melindungi warga sipil lainnya sebelum, selama, maupun setelah konflik kekerasan—tanpa menggunakan senjata.

UCP mencakup berbagai metode, di antaranya pendampingan fisik (*protective accompaniment* dan *protective presence*), mekanisme peringatan dini dan respons cepat (*early warning early response*), tim perempuan dan pemuda (Women Protection Team dan Youth Protection Team), teknik de-eskalasi konflik, pemantauan gencatan senjata dan perjanjian, pembentukan zona bebas senjata, dll. Dalam jangka panjang, UCP mendukung dan memperkuat infrastruktur perdamaian lokal melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas (Nonviolent Peaceforce [2022](#)).

Gelombang awal UCP diwarnai hadirnya pasukan sipil dari negara-negara Utara yang pasang badan melindungi warga sipil negara-negara Selatan. Didorong semangat dekolonisasi, telah terjadi pergeseran dari model tersebut, keluar dari ketergantungan terhadap *privilege* yang dibawa ras, kebangsaan, kelas, dan gender tertentu. Secara kelembagaan, UCP pernah hadir di Indonesia melalui Peace Brigades International yang bekerja di Papua, Aceh, Timor Barat, Flores, dan Jakarta dari tahun 1999-2011 dan kembali aktif pada 2014. Sementara itu, Nonviolent Peaceforce melalui Nurani Perdamaian beroperasi di Indonesia sejak tahun 2020, terutama di Aceh.

Cerita soal bagaimana UCP secara efektif melindungi perempuan, pemuda, orang tua, kelompok minoritas, dll di Sudan, Ukraina, Irak, Filipina, dan belahan dunia lainnya, termasuk Amerika Serikat dalam kasus Asian Hate—dapat ditemukan di situs [Creating Safer Space](#) dan [Nurani Perdamaian](#).

Peningkatan Kapasitas

Selama wawancara, para narasumber menunjukkan kesepemahaman akan pentingnya meningkatkan kapasitas AMS di Indonesia, supaya mereka dapat menjalankan perannya dengan lebih baik. Mereka juga cenderung sepaham bahwa mekanisme pengembangan kapasitas terpenting adalah pelatihan. Di sini, arti penting pelatihan tidak terbatas pada substansinya, tetapi juga pada prosesnya yang menyediakan ruang dan waktu bagi para AMS untuk bertemu dan bekerja sama di tengah kesibukan serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Sejumlah narasumber menyebutkan bagaimana pelatihan oleh AMS ibu kota—baik yang diselenggarakan di Jakarta maupun di daerah lain—mempertemukan AMS lokal yang mungkin tidak memiliki kesempatan duduk bersama jika tidak ada pelatihan tersebut. Namun, para narasumber juga menekankan supaya program-program pelatihan tidak memperkuat asumsi bahwa AMS Jakarta atau Jawa memiliki lebih banyak keunggulan yang bisa ditawarkan kepada mereka yang berasal di daerah lain. Mereka mendorong supaya AMS lebih reflektif ketika merancang pelatihan, misalnya dengan menempatkan AMS lokal sebagai pelatih dan/atau fasilitator, termasuk dalam pelatihan tingkat nasional.

Para narasumber menyebutkan bahwa pelatihan yang paling sering diselenggarakan dalam lima tahun terakhir adalah pelatihan tentang keamanan digital dan aktivisme digital. Secara umum, mereka merasa bahwa rangkaian pelatihan tersebut membantu atau bahkan mendorong mereka mengembangkan *Standard Operating Procedures* (SOP) guna mengantisipasi dan menanggapi risiko ancaman, termasuk yang berkaitan dengan represi fisik dan digital serta pelecehan seksual. Akan tetapi, beberapa dari mereka mencatat bahwa peningkatan pengetahuan tidak selalu diikuti dengan perubahan kebiasaan. Mereka mengakui bahwa banyak kolega mereka belum sepenuhnya mempraktikkan kebersihan digital (*digital hygiene*), baik karena terperangkap kebiasaan lama, terlena rasa cukup (*complacent*), atau terasa tidak praktis. Biasanya, hanya mereka yang pernah mengalami serangan digital secara langsung—atau orang-orang yang dekat dengan mereka—yang secara serius berupaya melindungi diri mereka sendiri dan lingkarannya. Ketika ditanya tentang efektivitas SOP mereka, sebagian besar narasumber mengakui bahwa SOP tersebut belum teruji ancaman nyata, meskipun telah disimulasikan. Selain itu, ketika ditanya apakah SOP tersebut berhasil menyoroti kerentanan khusus di antara kelompok tertentu, seperti perempuan, individu dengan keragaman SOGIESC, dan penyandang disabilitas, beberapa narasumber menjawab belum.

Selain SOP, para narasumber menggarisbawahi pentingnya keberadaan jaring pengaman (*safety net*). Para jurnalis yang menjadi narasumber kami menceritakan bagaimana mereka merasa didukung oleh Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) ketika mengalami *doxxing* dan ancaman lainnya. Ketika ditanya seputar kemampuan KKJ mendukung ratusan jurnalis sekaligus sekiranya terjadi serangan massal, mereka mengakui bahwa skenario tersebut belum pernah dipikirkan secara mendalam.

Salah satu jaring pengaman yang penting adalah dana darurat yang bisa dengan cepat dan mudah diakses oleh AMS, terutama ketika mereka menghadapi kriminalisasi, serangan fisik, pemutusan, dan sebagainya. Dana ini dapat digunakan untuk relokasi fisik, menyediakan rumah aman, biaya medis, bantuan hukum, dan sebagainya. Crisis Response Management (CRM) telah menyalurkan lebih dari 1,1 miliar rupiah dana darurat kepada lebih dari 4.700 individu ragam SOGIESC. Secara lebih umum, Dana Cepat Tanggap Darurat (DCTD) Kurawal telah mendukung 12 kasus dan 45 individu di antara bulan April 2023 dan Maret 2024, termasuk petani, pekerja, dan pelajar. Salah satunya, DCTD membantu sebuah portal media di Papua untuk melawan serangan digital setelah merilis informasi yang bertentangan dengan kepentingan negara, serta mendukung gerakan-gerakan di Labuan Bajo dan Wadas dalam melancarkan perlawanan nirkekerasan terhadap PSN.

Kembali ke bab dan sub-bab sebelumnya, sejumlah kapasitas yang perlu ditingkatkan meliputi keterampilan *brokering* dan berjejaring, keterampilan pengorganisasian masyarakat, keterampilan perlawanan nirkekerasan, keterampilan UCP, dll.

Catatan-Catatan Penting:

- AMS telah mendorong agenda demokrasi dan menentang otokratisasi melalui lima mekanisme utama: terlibat dalam kehidupan kewargaan sehari-hari, bergabung atau membentuk partai politik, bergabung atau menjadi konsultan untuk pemerintah, memanfaatkan mekanisme yudisial, dan melakukan perlawanan nirkekerasan. Sayangnya, mekanisme kedua dan ketiga terbukti tidak efektif.
- Repertoar perlawanan nirkekerasan yang ada, baik dalam bentuk konvensional maupun digital, masih sangat sempit dan intensitasnya rendah. AMS perlu memanfaatkan metode-metode berintensitas tinggi supaya dapat menimpakan efek kejut yang mengganggu keseimbangan lawan.
- AMS di Indonesia cenderung hanya berfokus pada titik keputusan dan titik destruksi. Kampanye digital sudah mulai menarget titik asumsi dan titik peluang. Namun, titik produksi dan titik konsumsi masih kurang didayagunakan.
- Tantangan peningkatan kapasitas AMS di Indonesia meliputi keterbatasan ruang dan waktu bagi AMS untuk bertemu dan bekerja sama, kurangnya uji tekanan (*stress-testing*) terhadap SOP, serta kebutuhan akan jaring pengaman, seperti komite keselamatan dan dana darurat.

Act

Bab “Gambaran Besar” menjabarkan strategi dan taktik yang dimainkan para otokrat guna mempersempit ruang-waktu sipil di Indonesia. Selanjutnya, bab “*Connect*” dan “*Defend*” menunjukkan betapa kewalahannya AMS, betapa sempitnya imajinasi di kalangan AMS mengenai aktor-aktor yang dapat diajak masuk barisan, betapa barisan AMS hanya secara renggang ditempatkan di titik keputusan dan titik destruksi, serta betapa mudahnya perlawanan dipatahkan karena hanya mengandalkan segelintir metode intensitas rendah. Mau tidak mau, AMS perlu bertindak sekarang, sebelum ruang-waktu sipil benar-benar tertutup. Kami merekomendasikan tiga strategi utama melawan penyusutan ruang-waktu sipil di Indonesia: (a) memadati ruang-waktu sipil, (b) menekan titik-titik vital, dan (c) bermain ofensif.

Memadati Ruang-Waktu Sipil

AMS telah tahu sama tahu bahwa mereka kewalahan menangkis otokratisasi, apalagi mengingat mereka melakukannya di samping pekerjaan utama sehari-hari. Karenanya, langkah strategis yang perlu diambil adalah menempatkan lebih banyak pemain dalam “barisan penyelamat demokrasi.” Mengingat pluriversalitas ruang-waktu sipil di Indonesia, AMS perlu terus menerus memetakan berbagai ekosistem mereka menggunakan Spektrum Sekutu—dengan kesadaran bahwa akan muncul peta yang berbeda antar wilayah, sektor isu, dan jaringan. Meski berbeda satu sama lain, satu hal yang cenderung mirip antara peta-peta yang ada adalah bahwa aktornya “itu-itu saja.” Pekerja LSM, LBH, serta jurnalis menempati satu sisi spektrum, sedangkan pejabat pemerintah, partai politik, perusahaan (terutama sektor ekstraktif), dan polisi ada di sisi spektrum yang lain.

Aktor Netral. Dalam melakukan pemetaan, penting untuk tidak hanya memikirkan sekutu yang sudah dimiliki dan sekutu yang berpotensi didekati, tetapi juga aktor-aktor netral. Selama ini, lawan secara aktif menarik aktor-aktor netral ke sisi spektrum mereka, baik dengan paksaan, kooptasi, atau dengan membanjiri ruang-waktu mereka. Karenanya, penting melakukan “tarikan balik” (*counterpull*) sehingga aktor-aktor netral, termasuk pekerja, guru, siswa, pemuda, seniman, pendukung sepak bola, orang tua, dll, semakin dekat berada di sisi kita.

Ajak Semua. Beberapa prinsip yang perlu dikembangkan ketika berusaha mengajak lebih banyak aktor untuk terlibat: sejak dini (mulai dari usia atau ruang sekolah), standar rendah (tidak perlu jadi aktivis dulu baru boleh bergabung), dan sistematis (terencana, terlembaga). Lawan tidak menetapkan standar tinggi untuk menarik aktor ke sisi mereka, karenanya AMS juga tidak boleh pasang standar tinggi.

Utamakan yang Rentan. Membentuk barisan yang kuat bukanlah soal mengumpulkan aktor terkuat dalam *all-star team*. Justru, yang paling penting adalah mengajak mereka yang paling rentan, sebagai bagian dari kewajiban saling jaga (*duty of care*). Semakin dekat kelompok paling rentan dalam Spektrum Sekutu, semakin banyak kita dapat membagikan *privilege* kita kepada mereka.

Privilege. AMS perlu lebih eksplisit meminjamkan *privilege* mereka—berdasarkan irisan identitas gender, kelas, agama, etnis, dis/abilitas, usia, dll—kepada yang lebih rentan. Solidaritas interseksional dan lintas sektoral ditandai dengan AMS saling menjadi sekutu aktif dan pasang badan untuk individu dan kelompok lain yang lebih rentan, sekalipun identitas dan bidang isu mereka sekilas saling berbeda.

Brokering. AMS dan donor perlu menginvestasikan waktu dan sumber daya guna mengidentifikasi, melatih, dan mendukung AMS yang bersedia mengambil peran sebagai perantara (*broker*) bagi kelompok-kelompok yang tidak terhubung satu sama lain. *Brokering* perlu difokuskan pada hubungan-hubungan yang menjembatani kelompok berlatar belakang berbeda, bukan yang mengikat kelompok berlatar belakang sama.

Kewargaan Kritis. Kurangnya kesadaran publik terhadap dua dekade otokratisasi dan tingginya persentase orang muda yang menyumbangkan suara untuk presiden terpilih 2024 mengindikasikan kegagalan besar pemikiran kritis dan pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum sekolah dan universitas di Indonesia nampaknya lebih berorientasi menciptakan tenaga kerja yang patuh daripada warga negara yang kritis. Pada titik ini, AMS perlu memikul peran tambahan dalam menanamkan pemikiran kritis dan mencontohkan perilaku kewargaan yang baik, termasuk lewat budaya populer.

Nasional sebagai Translokal. Mengingat bagaimana isu-isu lokal dan *low politics* sering kali dikesampingkan, sangat penting bagi AMS untuk mulai mengetengahkan perspektif lokal secara sengaja dan terencana. "Nasional" tidak melulu harus diartikan sebagai agregasi banyak "lokal," tetapi dapat dimaknai menjadi ruang di mana isu lokal menjadi perhatian bersama oleh AMS di lingkaran yang lebih luas.

Menekan di Titik-Titik Vital

Masyarakat sipil telah memainkan, dan terus memainkan, peran penting dalam mempertahankan ruang-waktu sipil, serta mengupayakan keadilan sosial dan lingkungan di Indonesia. Namun, pekerjaan penting ini sering kali membuat banyak aktivis dan jurnalis menjadi target represi. Upaya melindungi diri dari ancaman dan serangan telah memakan banyak waktu serta berpotensi melemahkan efektivitas AMS dalam menjaga ruang-waktu sipil dan demokrasi. Dalam jangka panjang, ini berpeluang menghambat keberlanjutan gerakan. Dengan sumber daya yang terbatas, AMS perlu memprioritaskan strategi yang dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan mereka, sekaligus meningkatkan peluang keberhasilan dalam mempertahankan diri dari penyusutan ruang-waktu sipil. Di sini, kami mendorong supaya AMS tidak sekadar bergerak pada bidang-bidang prioritas (*picking one's battles*) melainkan bergerak pada titik-titik vital lawan (*pushing the right buttons*). Ini bukan sekadar mengutamakan langkah yang sesuai dengan kapasitas kita, melainkan langkah yang menasar titik lemah lawan.

Pelatihan. Meskipun dalam dekade terakhir terdapat peningkatan jumlah pelatihan, terutama seputar keamanan dan aktivisme digital, penting diingat bahwa akses dan kemampuan AMS di berbagai wilayah tidak merata. Juga, keikutsertaan dalam pelatihan tidak serta berarti kemampuan melatih hal tersebut kepada pihak lain. Perlu lebih banyak pelatihan, terutama pelatihan untuk pelatih (*training of trainers*), di tingkat lokal yang mengutamakan aktor-aktor lokal, supaya hasilnya dapat direplikasi cara yang lebih luas, berkelanjutan, dan terjangkau.

SOP. Meski banyak organisasi sudah memilikinya, SOP yang ada biasanya belum cukup mengalami *stress-testing*. Koalisi AMS dapat mengembangkan *stress-testing* guna menilai kelaikan dan efektivitas langkah-langkah perlindungan mereka.

UCP. Mengingat maraknya ancaman dan serangan fisik terhadap para aktivis di berbagai daerah, AMS dan donor dapat mendorong pelatihan dan penerapan metode UCP yang efektif melindungi kelompok rentan di berbagai konteks konflik dan pascakonflik di seluruh dunia.

Kesadaran luas. Guna membangun koalisi yang luas, AMS perlu memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kesadaran yang memadai tentang parahnya penyusutan ruang-waktu sipil dan otokratisasi. Kesadaran ini utamanya perlu dilakukan di luar "bubble" koalisi mereka.

Dilemma action. Mereka yang telah berkesadaran kritis perlu didorong melakukan perlawanan nirkekerasan, baik melalui aktivisme konvensional maupun digital. Penekanannya di sini adalah memanfaatkan metode yang beragam dan intensitas yang tinggi supaya dapat menimpakan *dilemma action* yang pas kepada lawan—memaksa lawan menghitung ulang ongkos politik, moral, sosial, dan ekonomi yang harus ditanggungnya jika tidak memenuhi tuntutan kita.

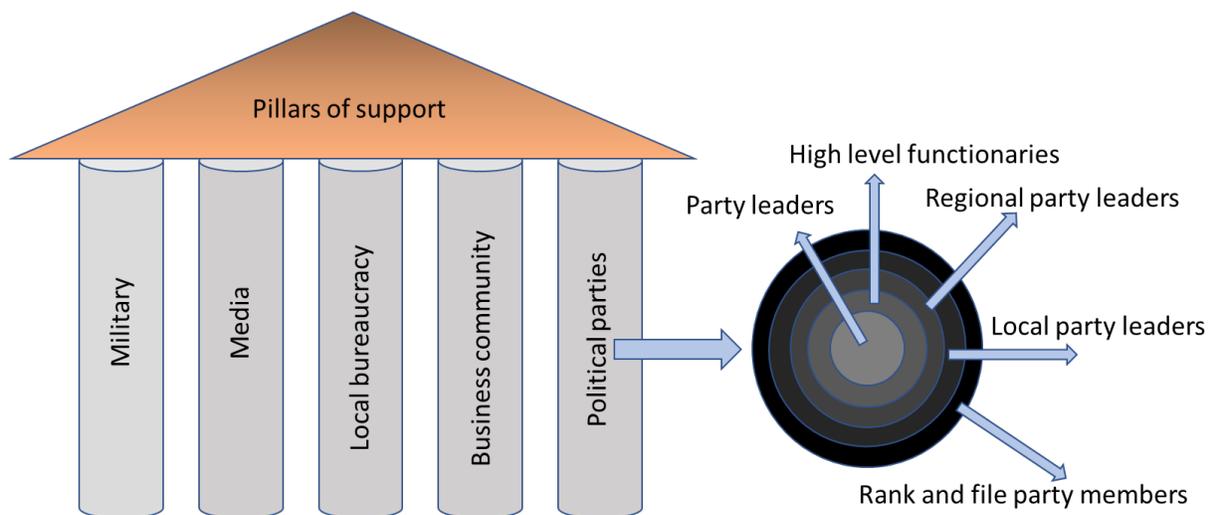
Titik Intervensi. AMS harus mengelaborasi titik-titik intervensi yang dapat didayagunakan, terutama yang belum dimanfaatkan sejauh ini, seperti titik produksi dan titik konsumsi.

Dana Darurat. Donor internasional perlu meningkatkan dukungan mereka kepada AMS, terutama dalam penyediaan dana darurat yang dapat diakses secara cepat dan fleksibel. Dukungan ini menjadi lebih penting di pengalihan dana dari kerja-kerja perlindungan HAM ke proyek-proyek pembangunan, dari LSM ke badan-badan pemerintah (seperti Bappenas).

Bermain Ofensif

Sepanjang dekade terakhir, para otokratlah yang menentukan pola permainan, di mana AMS dilenakan atau dipaksa bertahan. Kini, AMS perlu berbalik strategi, dari bertahan ke menyerang. Studi Perlawanan Nirkekerasan dan Studi Gerakan Sosial mengajarkan bahwa bergerak adalah satu faktor penting guna menarik aktor-aktor baru untuk terlibat dan membentuk koalisi-koalisi baru. Gerakan-gerakan yang dibangun dari kemenangan-kemenangan kecil sering kali berkembang menjadi besar, lalu dapat menghentikan atau bahkan memutarbalikkan otokratisasi. Kami percaya bahwa AMS perlu bermain lebih ofensif, tidak hanya defensif terhadap serangan dari otokrat.

Gambar 7. Pilar-Pilar Dukungan



Dimodifikasi dari Popovic et al. (2007)

Skenario dan Simulasi. Melihat bagaimana elite politik Indonesia setia mengikuti Buku Pedoman Otoritarianisme, AMS dapat secara proaktif mengantisipasi langkah-langkah para otokrat selanjutnya. AMS perlu mulai mengembangkan skenario dan simulasi yang memprediksi langkah-langkah para otokrat dan mengembangkan strategi untuk menangkalnya.

Pilar Dukungan. Jika Spektrum Sekutu memetakan aktor yang dapat diandalkan guna mendukung tujuan kita, Pilar Dukungan (lihat Gambar 7) adalah kerangka dari Studi Perlawanan Nirkekerasan guna memetakan secara sangat rinci siapa saja dalam koalisi kawan yang dapat dilemahkan atau bahkan ditarik posisinya ke Spektrum Sekutu.

Koalisi Supermayoritas yang Tidak Stabil. Berbagai kajian dalam Ilmu Politik menunjukkan bahwa koalisi besar pada dasarnya tidak stabil, mengingat para aktor cenderung membentuk *winning coalition* yang cukup besar untuk memastikan kemenangan tetapi cukup kecil sehingga bagi hasil (kursi kekuasaan, proyek pembangunan, dll) tetap menguntungkan bagi semua yang terlibat. Artinya, dapat diasumsikan bahwa koalisi supermayoritas yang ada saat ini tidak sestabil itu. Perpecahan dapat terjadi kapan saja, di mana AMS perlu bersiap menarik mereka yang keluar dari koalisi ini ke dalam Spektrum Sekutu—kalaupun bukan sebagai sekutu aktif atau sekutu pasif, setidaknya sebagai aktor netral.

Harga Mati. Di tengah otokratisasi yang terus merayap, AMS perlu secara bersama-sama menentukan di mana garis merah (*red line*) yang menjadi harga mati mereka—misalnya pembatalan pemilihan umum langsung, pencanangan masa jabatan ketiga presiden, dll. Harga mati ini harus dikomunikasikan dengan jelas kepada publik dan elite. Semua perlu tahu bahwa jika harga mati ini dilanggar lawan, rakyat akan beramai-ramai melancarkan perlawanan masif, baik turun ke jalanan, mogok, dan lainnya.

Yudikatif. Mengingat bahwa penyusutan ruang-waktu sipil ditopang oleh sejumlah UU dan aturan, AMS perlu terus melakukan perlawanan melalui jalur hukum, termasuk mendorong *judicial review*. Juga, AMS perlu terus merekam dampak negatif dari aneka UU dan aturan tersebut, lalu menggunakannya dalam forum-forum advokasi internasional. Meski ada banyak kekurangan dalam sistem hukum di Indonesia, yudikatif menjadi jalur konstitusional-institusional yang penting, di tengah eksekutif, legislatif, media, dan partai politik yang sejauh ini justru melemahkan demokrasi Indonesia.

Referensi

Aho, E. & Grinde, J. (2017). Shrinking Space for Civil Society - Challenges in Implementing the 2030 Agenda. Forum Syd.

<https://forumciv.org/sites/default/files/2018-03/Shrinking-Space%20-%20Challenges%20in%20implementing%20the%202030%20agenda.pdf>

Alinsky, S. (1971). Rules For Radicals. New York: Vintage Books.

Amnesty International Indonesia. (2022). Meredam Suara, Membungkam Kritik.

https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2022/10/ASA2160132022_FINAL_TE RGERUSNYA-KEBEBASAN-SIPIL-DI-INDONESIA-3.pdf

Argama, R., Oktaryal, A., Sabillah, A., Saputra, A. F., Nugroho, E., Nursyamsi, F., Damayana, G. P., Poerba, J. & Rofiandri, R. (2022). Pelindungan dan Perluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil. Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia.

<https://pshk.or.id/publikasi/pelindungan-dan-peluasan-ruang-gerak-masyarakat-sipil/>

Boyd, A., & Mitchell, D. O. (2012). Beautiful Trouble: A Toolbox for Revolution. OR Books.
<https://doi.org/10.2307/j.ctt1bkm5nd>

Boyd, A. & Mitchell D. O. (eds.) (2012). Beautiful Trouble: A Toolbox for Revolution.
<https://beautifultrouble.org/>

Canning, D. & Reinsborough, P. (N.d.). Points of Intervention. Beautiful Trouble.
<https://beautifultrouble.org/toolbox/tool/points-of-intervention>

Chenoweth, E. (2020). The Future of Nonviolent Resistance. Journal of Democracy, 31(3).

CIVICUS Monitor. (2024). Rights Reversed: A Downward Shift in Civic Space (2019-2023).
<https://civicsmonitor.contentfiles.net/media/documents/RightsReversed.2019to2023.pdf>

CPI & PSKP. (2002). Building Sustainable Peace and Fostering Development in Papua.
https://www.hpcrresearch.org/sites/default/files/publications/final_report_english.pdf

CRM. (2022). CRM Consortium. <https://crm-consortium.org>

Dewi, A. F., Tua, B., Subakti, D. A., Syam, N. F. & Pratama, R. K. (2024). Memperkuat Ruang Sipil (Civic Space) dalam Akses Indonesia Menuju OECD. Infid.
<https://infid.org/memperkuat-ruang-sipil-civic-space-dalam-aksesi-indonesia-menuju-oecd/>

Dresden, J., Baird, A. & Raderstorf, B. (2022). The Authoritarian Playbook. Protect Democracy.
<https://protectdemocracy.org/wp-content/uploads/2024/03/The-Authoritarian-Playbook-Updated.pdf>

Dresden, J. & Howard, M. (2016). Authoritarian backsliding and the concentration of political power. Democratization, 23(7), 1122-1143.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2015.1045884>

Economist Intelligence Unit. (2014). Democracy Index 2014.
https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy0115

Economist Intelligence Unit. (2015). Democracy Index 2015: Democracy in an age of anxiety.
https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex2015

Economist Intelligence Unit. (2016). Democracy Index 2016: Revenge of the "deplorables".
https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex2016

Economist Intelligence Unit. (2017). Democracy Index 2017: Free speech under attack.
https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex2017

Economist Intelligence Unit. (2018). Democracy Index 2018: Me too? Political participation, protest and democracy.
<https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2018/>

Economist Intelligence Unit. (2019). Democracy Index 2019: A year of democratic backsliding and popular protest.
<https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2019/>

Economist Intelligence Unit. (2020). Democracy Index 2020.
<https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/>

- Economist Intelligence Unit. (2021). Democracy Index 2021: the China challenge. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/>
- Economist Intelligence Unit. (2022). Democracy Index 2022. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/>
- Economist Intelligence Unit. (2023). Democracy Index 2023. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2023/>
- European Civic Forum. (2024). Civic Space Report 2024. <https://civic-forum.eu/civic-space-report-2024>
- Fajar, M., Adam, L., Nastiti, A. D. & Kenawas, Y. C. (2022). Aktivisme Digital Indonesia. Yayasan Tifa. <https://bit.ly/TIFA-DatasetAktivismeDigital>
- Freedom House. (2014). Freedom in the World 2014. https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/Freedom_in_the_World_2014_complete_book.pdf
- Freedom House. (2015). Freedom in the World 2015. https://freedomhouse.org/sites/default/files/01152015_FIW_2015_final.pdf
- Freedom House. (2016). Freedom in the World 2016. https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FITW_Report_2016.pdf
- Freedom House. (2017). Freedom in the World 2017. https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FIW_2017_Report_Final.pdf
- Freedom House. (2018). Freedom in the World 2018. https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FITW_Report_2018_Final_SinglePage.pdf
- Freedom House. (2019). Freedom in the World 2019. https://freedomhouse.org/sites/default/files/Feb2019_FH_FITW_2019_Report_ForWeb-compressed.pdf
- Freedom House. (2020). Freedom in the World 2020: A Leaderless Struggle for Democracy. https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/FIW_2020_REPORT_BOOKLET_Final.pdf
- Freedom House. (2021). Freedom in the World 2021: Democracy under Siege. https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-02/FIW2021_World_02252021_FINAL-web-upload.pdf
- Freedom House. (2022). Freedom in the World 2022: The Global Expansion of Authoritarian Rule. https://freedomhouse.org/sites/default/files/2022-02/FIW_2022_PDF_Booklet_Digital_Final_Web.pdf
- Freedom House. (2023). Freedom in the World 2023: Marking 50 Years in the Struggle for Democracy. https://freedomhouse.org/sites/default/files/2023-03/FIW_World_2023_DigitalPDF.pdf
- Freedom House. (2024). Freedom in the World 2024: The Mounting Damage of Flawed Elections and Armed Conflict. https://freedomhouse.org/sites/default/files/2024-02/FIW_2024_DigitalBooklet.pdf
- Geddes, B., Wright, J. & Frantz, E. (2014). Autocratic Breakdown and Regime Transitions: A New Data Set. *Perspectives on Politics*, 12(2), 313-331. <https://www.jstor.org/stable/43279909>
- George, J. J. & Leidner, D. E. (2019). From clicktivism to hacktivism: Understanding digital activism. *Information and Organization*, Vol. 29(3). <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2019.04.001>
- Grillo, E., Luo, Z., Nalepa, M. & Prato, C. (2024). Theories of Democratic Backsliding. *Annual Review of Political Science*, 27, 381-400. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-041322-025352>
- Hamid, U., Birks, T. & Indriansyah, N. F. (2021). Protection of Social Justice Leaders in Indonesia. *Public Virtue*.
- Herwati, S. R. M. & Wungkana, P. D. (2023). Human Rights Violations in Indonesia's National Strategic Development Project. *Indonesian Journal of Law and Society*, 4(2), 1-32. <https://doi.org/10.19184/ijls.v4i2.43006>
- Hidayat, N., Makarim, M. & Nugroho, E. (2019). Shrinking Civic Space in ASEAN Countries: Indonesia and Thailand. Lokataru Foundation. <https://lokataru.id/wp-content/uploads/2019/11/shrinking-space-asean-country-2.pdf>
- International Center for Not-for-Profit Law. (2024). Indonesia. <https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/indonesia>
- Jaffrey, S. (2020). In the state's stead? Vigilantism and policing of religious offence in Indonesia. In T. Power & E. Warburton (Eds.), *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* ISEAS Publishing.
- Jaffrey, S. (2021). Right-wing populism and vigilante violence in Asia. *Studies in Comparative International Development*, 56, 223-249. <https://doi.org/10.1007/s12116-021-09336-7>

- Jong, H. N. (2020). Experts see environmental, social fallout in Indonesia's infrastructure push. Mongabay. <https://news.mongabay.com/2020/06/indonesia-national-strategic-project-infrastructure-road-railway-dam-smelter-nickel-peatland/>
- Kaufman, R. & Haggard, S. (2021). Backsliding: Democratic Regress in the Contemporary World. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Kemitraan. (2024). Catatan Kelabu Pelindungan terhadap Pembela HAM 2014-2023. <https://kemitraan.or.id/book/catatan-kelabu-pelindungan-terhadap-pembela-ham-2014-2023/>
- Keutgen, J. & Dodsworth, S. (2020). Addressing the global emergency of shrinking civic space and how to reclaim it: a programming guide. Westminster Foundation for Democracy. <https://www.wfd.org/what-we-do/resources/addressing-global-emergency-shrinking-civic-space-and-how-reclaim-it>
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2023). Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024. <https://www.kpa.or.id/publikasi/dekade-krisis-agraria-warisan-nawacita-dan-masa-depan-reforma-agraria-pasca-perubahan-politik-2024/>
- KontraS. (2023). Catatan Hari HAM 2023 "HAM dalam Manipulasi dan Cengkraman Hegemoni Kekuasaan". <https://kontras.org/laporan/catatan-hari-ham-2023-ham-dalam-manipulasi-dan-cengkraman-hegemoni-kekuasaan>
- Kurawal Foundation. (2023). Laporan Tahunan 2023: Tegak Lurus Menolak "Jokowisme".
- Kusumaningrum, D. & Aprillia, K. (2022). Nonviolent Resistance in Indonesia: A Study of Six Reformist Campaigns. International Peace Research Association Foundation.
- Kusumaningrum, D., Handiani, D. S., Petz, D. & Stabell, K. P. (2024). A Race Against Time: Nonviolent Resistance in Indonesia and the World 2023. Damai Pangkal Damai. <http://ugm.id/NVResistance2023>
- Kusumaningrum, D., Handiani, D. S., Putrawidjoyo, A. & Petz, D. (2023). Stepping Up the Good Fight? Nonviolent Resistance in Indonesia and the World 2022. Damai Pangkal Damai. <https://ugm.id/NVResistance2022>
- Kusumaningrum, D., Handiani, D. S., Aprillia, K. R. & Petz, D. (2022). Pushing Back Autocratization: Nonviolent Resistance in Indonesia and the World 2021. Damai Pangkal Damai. ugm.id/NVResistance2021
- Kusumaningrum, D., Handiani, D. S., Aprillia, K. R. & Petz, D. (2021). Defending Democracy Amidst a Pandemic: Nonviolent Resistance in Indonesia and the World 2020. Damai Pangkal Damai. ugm.id/Nirkekerasan2020
- Popovic, S., Djinovic, S., Milivojevic, A., Merriman, H., & Marovic, I. (2007). Canvas Core Curriculum: A Guide to Effective Nonviolent Struggle. Serbia: Canvas.
- LBH Jakarta. (2023). Jalan Asa Demokrasi di Negara Oligarki: Catatan Akhir Tahun 2023. <https://bantuanhukum.or.id/catatan-akhir-tahun-lbh-jakarta-jalan-asa-demokrasi-di-negara-oligarki/>
- Levitsky, S. & Ziblatt, D. (2018). How Democracies Die. New York: Crown.
- Lührmann, A. & Lindberg, S. I. (2019). A third wave of autocratization is here: what is new about it? Democratization, 26(7). <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1582029>
- Matsheza, S. (2018). Annual report 2017. Transnational Institute. <https://www.tni.org/en/publication/annual-report-2017>
- Mietzner, M. (2024). The limits of autocratization in Indonesia: power dispersal and elite competition in a compromised democracy. Third World Quarterly, 1-17. <https://doi.org/10.1080/01436597.2024.2317970>
- Muhtadi, B. & Muslim, K. (2024). Assessing Prabowo-Gibran's Victory: An Exit-Poll Aftermath Analysis of the 2024 Presidential Election. Fulcrum. <https://fulcrum.sg/assessing-prabowo-gibrans-victory-an-exit-poll-aftermath-analysis-of-the-2024-presidential-election/>
- OHCHR. (N.d.). OHCHR and protecting and expanding civic space. United Nations Human Rights. <https://www.ohchr.org/en/civic-space>
- OHCHR-Europe Regional Office. (N.d.). Protecting and expanding civic space in the EU and beyond. United Nations Human Rights. https://europe.ohchr.org/sites/default/files/2023-07/Civic%20spacex%20final_0.pdf
- OHCHR-East Africa Regional Office. (2017). Civic Space and Effects of Shrinking Space on Women Human Rights Defenders in East Africa. United Nations Human Rights. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/WHRDEastAfricaReport.pdf>
- Oxfam. (N.d.). Civic Space Monitoring Tool: Understanding what is happening in civic space at a local and national level. <https://policy-practice.oxfam.org/resources/civic-space->

[monitoring-tool-understanding-what-is-happening-in-civic-space-at-a-620874/](#)

Petz, D. (2021). The Dark Side of Nonviolent Action? *Populism*, 4(2), 221-244.
<https://doi.org/10.1163/25888072-bja10023>

Petz, D., Handiani, D. S. & Kusumaningrum, D. (2022). *Damai Pangkal Damai: Insights from A Database of Nonviolent Actions in Post-Soeharto Indonesia*. International Peace Research Association Foundation.

Popovic, S., Djinojic, S., Milivojevic, A., Merriman, H., & Marovic, I. (2007). *CANVAS Core Curriculum: A Guide to Effective Nonviolent Struggle*. Belgrade: CANVAS.
https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2016/04/CANVAS-Core-Curriculum_EN4.pdf

Protect Democracy. (2022). *The Authoritarian Playbook*. <https://protectdemocracy.org/wp-content/uploads/2024/03/The-Authoritarian-Playbook-Updated.pdf>

PurpleCode Collective. (2022). *Privasi di Ruang Tak Bertepi: Memaknai Privasi Melalui Kacamata Feminis*. <https://web.tresorit.com/l/7VrLq#SoR9Zu5qWFY6m5c4yXKcNg>

Reinsborough, P. & Canning, D. (2017). *Re:Imagining Change. How to Use Story-Based Strategy to Win Campaigns, Build Movements, and Change the World*. PM Press.

Setijadi, C. (2021). The Pandemic as Political opportunity: Jokowi's Indonesia in the Time of Covid-19. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(3), 297–320.
<https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2004342>

Sharp, G. (1973). *The Politics of Nonviolent Action*. Boston: Porter Sargent.

Stoner, E. (N.d.). *Pillars of power. Beautiful Trouble*. <https://beautifultrouble.org/toolbox/tool/pillars-of-power>

Sutanto, T. S., Asfinawati, Ali-Fauzi, I., Maufur, Cholil, S., Bagir, Z. A. (2024). *Ketegangan Kebebasan dan Kerukunan Beragama di Indonesia: Telaah Sejarah, Politik, dan Hukum*. PUSAD Paramadina.
<https://www.paramadina-pusad.or.id/buku/kegangangan-kebebasan-dan-kerukunan-beragama-di-indonesia-telaah-sejarah-politik-dan-hukum/>

Transnational Institute. (2017). On “shrinking space” a framing paper. Issue Brief Shrinking Space.
https://www.tni.org/files/publication-downloads/on_shrinking_space_2.pdf

Ulya, F. N. & Rastika, I. (2024). *Survei Indikator: Pemilih Prabowo Banyak dari Gen Z dan Milenial, Pemilih Ganjar Didominasi Kalangan Tua*. Kompas.com.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/02/21/17550901/survei-indikator-pemilih-prabowo-banyak-dari-gen-z-dan-milenial-pemilih?page=all>

Varshney, A. (2002). *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*. Yale University Press.
<https://www.jstor.org/stable/j.ctt1nq5hn>

V-Dem Institute. (2017). *Democracy Report 2017: Democracy at Dusk?* https://www.v-dem.net/documents/18/dr_2017.pdf

V-Dem Institute. (2018). *Democracy Report 2018: Democracy for All?* https://www.v-dem.net/documents/17/dr_2018.pdf

V-Dem Institute. (2019). *Democracy Report 2019: Democracy Facing Global Challenges*. https://www.v-dem.net/documents/16/dr_2019_CoXPbb1.pdf

V-Dem Institute. (2020). *Democracy Report 2020: Autocratization Surges - Resistance Grows*. https://www.v-dem.net/documents/14/dr_2020_dqumD5e.pdf

V-Dem Institute. (2021). *Democracy Report 2021: Autocratization Turns Viral*. https://www.v-dem.net/documents/12/dr_2021.pdf

V-Dem Institute. (2022). *Democracy Report 2022: Autocratization Changing Nature?* https://www.v-dem.net/documents/19/dr_2022_ipyOpLP.pdf

V-Dem Institute. (2023). *Democracy Report 2023: Defiance in the Face of Autocratization*. https://www.v-dem.net/documents/29/V-dem_democracyreport2023_lowres.pdf

V-Dem Institute. (2024). *Democracy Report 2024: Democracy Winning and Losing the Ballot*. https://www.v-dem.net/documents/43/v-dem_dr2024_lowres.pdf

Verico, K., Wibowo, H. & Yudhistira, M. H. (2023). *Infrastructure for Inclusive Economic Development Vol.2: Case Studies of Accelerated Projects*. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia.
<https://www.eria.org/research/infrastructure-for-inclusive-economic-development-vol2-case-studies-of-accelerated-projects>

Yohana, C., Saputra, E., Rahman, F. H., Raviola, M., Rizki, M., Aidawardhani, N., Ruray, N. A., Liony, R. (2021). *Anak Muda dan Krisis Iklim*. Pamflet.
<https://pamflet.or.id/d52e043b-ceb6-42db-9510-7caaa4bb6712>

Datasets

CIVICUS. (2024). Civic Space Scores [Dataset]. <https://monitor.civicus.org/data/>

Damai Pangkal Damai. (2024). A Database of Nonviolent Actions in Indonesia throughout Reformasi [Dataset]. ugm.id/DPDdatabase

Economist Intelligence Unit. (2006-2024). Democracy index [Dataset]. <https://ourworldindata.org/grapher/democracy-index-eiu?tab=chart%20%20%20https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/>

Freedom House. (2013-2024). Freedom in the World [Dataset]. <https://freedomhouse.org/reports/publication-archives>

Nonviolent Action Lab. (1900-2021). Nonviolent and Violent Campaigns and Outcomes (NAVCO) Data Project [Dataset]. Harvard Kennedy School. <https://ash.harvard.edu/programs/nonviolent-and-violent-campaigns-and-outcomes-data-project/>

V-Dem Institute. (2024). The V-Dem Dataset [Dataset]. <https://v-dem.net/data/the-v-dem-dataset/>

Lampiran

Lampiran 1. Tabel Panduan Rumusan Pertanyaan.

Pertanyaan <i>Baseline</i> dari Indikator Proyek CDA	Pertanyaan Studi <i>Baseline</i> dari Kerangka Acuan Humanis
Identifikasi tingkat kapasitas AMS terkait keamanan digital/holistik. Contoh: Apakah mereka memiliki SOP? Pelatihan? Pendampingan? Dukungan? Dsb.	
Apakah AMS pernah mengalami serangan digital dalam 5 tahun terakhir? Jika ya, apa saja kasusnya? Apakah kasus tersebut berhasil diselesaikan? Apakah kasus tersebut terdokumentasi?	
Apakah AMS saat ini memiliki materi/kurikulum/silabus, atau bahan lain terkait keamanan digital? Jika ya, apakah materi tersebut dibuat dari awal atau diadaptasi dari pihak lain? Jika diadaptasi, dari siapa? Bagaimana mereka memanfaatkan materi tersebut?	Apa tren dan perkembangan utama terkait keamanan digital (dan non-digital) yang memengaruhi kemampuan AMS untuk membela hak asasi manusia di tengah ruang sipil yang menyusut?
Berapa banyak anggota organisasi AMS yang dilatih sebagai pelatih keamanan digital?	
Apa strategi AMS untuk menghadapi serangan digital, fisik, hukum, dan psikososial yang mendesak? Apa mekanisme yang sudah ada untuk menghubungi penyedia dukungan? Bagaimana sistem rujukannya bekerja?	
	Apa saja hukum/kebijakan/regulasi kunci di tingkat nasional hingga sub-nasional yang memengaruhi pekerjaan AMS dalam membela hak asasi manusia dan ruang sipil?
Identifikasi media/ruang kolaborasi apa saja yang dimiliki oleh AMS?	
Seberapa rutin AMS melakukan pemantauan terkait isu ruang sipil? Bagaimana mereka melakukannya? Apa saja manfaat dan siapa saja pengguna hasil pemantauan tersebut?	Apa saja koalisi, jaringan, dan struktur koordinasi (formal dan informal) yang sudah ada di antara AMS yang aktif membela hak asasi manusia dan ruang sipil?
Forum regional dan internasional strategis apa yang ingin diikuti oleh AMS? Mengapa?	
	Bagaimana situasi pasca pemilu secara khusus memengaruhi perempuan dan kelompok rentan/marginal (misalnya, kelompok adat, kelompok lokal, LGBTQI+, minoritas agama)?
Apa strategi AMS untuk menghadapi serangan mendesak, baik digital, fisik, hukum, maupun psikososial? Apa mekanisme yang sudah ada untuk mengakses penyedia dukungan? Bagaimana sistem rujukannya bekerja?	Apa SWOT dan tantangan spesifik dari koalisi AMS, terutama yang mewakili perempuan, LGBTQI+, dan kelompok marginal lainnya?
Apa strategi AMS untuk menghadapi serangan mendesak, baik digital, fisik, hukum, maupun psikososial? Apa mekanisme yang sudah ada untuk mengakses penyedia dukungan? Bagaimana sistem rujukannya bekerja?	Apa isu/kekhawatiran spesifik serta medium/platform dan bentuk aktivisme yang dimiliki orang muda Indonesia saat ini untuk membela hak asasi manusia dan ruang sipil?
Bagaimana AMS mendefinisikan "pengaruh positif," dan bagaimana mereka mendapatkan serta berbagi pengaruh tersebut? Apa saja kegiatan pertukaran pengetahuan yang mereka inisiasi atau ikuti?	Apa refleksi dan ide tentang bagaimana kita dapat mendukung regenerasi AMS, aktivis, dan pembela hak asasi manusia dengan lebih baik?
Bagaimana AMS mengembangkan strategi berbasis bukti untuk advokasi/kampanye/intervensi mereka? Contoh yang relevan dalam 5 tahun terakhir?	
Apa aspirasi AMS tentang kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas organisasi? Di bagian/aspek mana mereka merasa paling mendesak? Dalam bentuk apa pihak lain dapat membantu/mendukung?	Buat pemetaan pemangku kepentingan dan rekomendasi untuk implementasi proyek berdasarkan poin-poin yang disebutkan di atas.

Lampiran 2. Data Responden Wawancara Informan Kunci.

Jumlah responden berdasarkan gender (P/L/Nonbiner)	Jumlah responden berdasarkan usia (< atau > 40 tahun)	Jumlah responden berdasarkan lokasi (Jawa/Luar Jawa)	Jumlah responden dengan disabilitas
Perempuan: 13 Laki-laki: 7 Nonbiner: 0	Di bawah 40: 14 Di atas 40: 6	Luar Jawa: 13 Jawa: 7	Disabilitas fisik: 1 Non-disabilitas: 19
Total Responden: 20			